



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah instrumen kebijakan yang diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebenarnya, KLHS telah menjadi instrumen yang lama dipraktekkan di negara-negara lain, khususnya negara maju dengan nama Strategic Environmental Assesment (SEA). UU Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai rangkain analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bawa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Secara eksplisit dalam definisi tersebut bahwa tujuan utama dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan Program (KRP) selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam penataan wilayah, aspek lingkungan sangat penting dikarenakan dalam melakukan kegiatan penataan ruang harus memperhatikan unsur-



unsur lingkungan. Hal ini tercantum dalam peraturan penataan ruang. Meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut belum mampu diaplikasikan secara optimal mengingat beragamnya kondisi wilayah di Indonesia. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa kegiatan penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial.

Perwujudan dari tujuan ini adalah KRP yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sosial saja dengan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup, melainkan KRP yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka kualitas dan kelestarian lingkungan hidup akan tetap terjaga. KRP dapat diibaratkan sebagai hulu, dengan proyek atau kegiatan/aktivitas adalah hilirnya. Memastikan bahwa KRP telah seimbang dan selaras antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup artinya memberikan jaminan lebih bahwa proyek/aktivitas nantinya adalah jenis proyek yang juga berkelanjutan (*sustainable*). KRP yang dimaksud khususnya yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik rencana umum maupun rencana detail, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya, dokumen-dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, kesemuanya wajib di-KLHS-kan. KRP selain pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut, juga wajib untuk di-KLHS-kan sepanjang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan kegiatan penataan ruang terlebih dulu kita harus melakukan dan membuat kajian terhadap aspek dan unsur lingkungan yang akan dilakukan penataan ruang, contoh kajian itu adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah

sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek dan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambil keputusan.

Dalam KLHS terdapat serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program. Secara mendasar fungsi dari KLHS itu sendiri antara lain agar dapat memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, memperkuat dan memfasilitasi AMDAL serta mendorong pendekatan atau cara baru dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi perencanaan pembangunan yang dirinci dalam RPJP.

KLHS bisa menentukan substansi RPJP, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RPJP, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi tersebut. Atas dasar tersebut, BAPPEDA Kota Pontianak pada tahun 2017 ini berinisiasi melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dapat mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS untuk RPJP Kota Pontianak.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Dengan melihat latar belakang yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa **tujuan** dari pekerjaan ini adalah:



1. Untuk menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan dan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam penyusunan RPJP Kota Pontianak;
2. Untuk meningkatkan kualitas RPJP Kota Pontianak sebagai upaya dan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berdasarkan pembuatan penataan ruang dan arahan pemanfaatan lahan yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Sebagai bahan rekomendasi rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum dan program pembangunan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak ;
4. Untuk memberikan rekomendasi untuk mitigasi potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program-program prioritas dalam RPJP Kota Pontianak;
5. Sebagai pemikiran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dalam usaha untuk mendorong diterapkannya pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan **sasaran** dari kegiatan Kajian KLHS Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terlaksanakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJP Kota Pontianak dengan mengacu ke dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Terciptanya peningkatan kualitas RPJP Kota Pontianak sebagai upaya dan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berdasarkan pembuatan penataan ruang dan arahan pemanfaatan lahan yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Terumuskannya rekomendasi rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum dan



program pembangunan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak;

4. Terumuskannya rekomendasi untuk mitigasi potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan program-program prioritas dalam RPJP Kota Pontianak;
5. Terumuskannya pemikiran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dalam usaha untuk mendorong diterapkannya pembangunan berkelanjutan.

1.3 REFERENSI HUKUM

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025;
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak 2005-2025;

1.4 METODOLOGI

1) Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang nantinya akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan KLHS RPJPD Kota Pontianak dari awal hingga akhir. Pemetaan pemangku kepentingan dengan memperhatikan seluruh kelompok pemangku kepentingan, yang meliputi unsur birokrat, akademisi, dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan di dalam kerja kelompok dengan mengidentifikasi kelompok - kelompok pemangku kepentingan (birokrat, akademisi, dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat) yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyusunan kawasan perkotaan atau akan terkena dampak signifikan dari pelaksanaan. Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan digunakan oleh Tim KLHS dalam upaya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan KLHS.

2) Pelingkupan dan Pemusatan Isu Pembangunan

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan partisipatif untuk mengidentifikasi isu - isu pembangunan daerah yang direncanakan yang sedang dan akan dihadapi. Proses pelingkupan diawali dengan kegiatan

pra pelingkupan yang dilakukan oleh Tim KLHS pada saat bimbingan teknis, dengan ditambahkan dari telaah dokumen - dokumen perencanaan yang ada. Kegiatan ini dilanjutkan dengan melakukan proses pelingkupan bersama - sama dengan para pemangku kepentingan. Proses pelingkupan dengan para pemangku kepentingan dilakukan di dalam workshop pelingkupan melalui kerja kelompok dengan menggunakan metode/instrumen *meta plan*. Setiap peserta diminta untuk menuliskan isu penting di dalam meta plan. Isu - isu yang terjaring dari peserta kemudian dikelompokkan dengan metoda kategorisasi dan klasifikasi, sehingga daftar isu yang panjang menjadi lebih pendek. Setelah dikelompokkan, isu - isu tersebut kemudian diuji apakah hal tersebut benar - benar merupakan isu yang bersifat strategis dengan menggunakan beberapa kriteria, sehingga menghasilkan daftar pendek isu - isu pembangunan berkelanjutan yang benar - benar bersifat strategis. Daftar pendek isu - isu strategis yang diperoleh dari para pemangku kepentingan ini kemudian dipadukan dengan isu - isu strategis hasil pra pelingkupan dan kemudian disaring/ditapis lagi dengan analisis data baseline.

3) Pengumpulan, Penyajian, dan Analisis Data

Data dan informasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan KLHS RPJPD Kota Pontianak. Ketersediaan data dan informasi yang tepat dan akurat dapat meningkatkan peran dan manfaat hasil KLHS. Data dan informasi yang digunakan dalam KLHS RPJPD Kota Pontianak adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi data institusional. Kebutuhan data dalam penerapan KLHS RPJPD Kota Pontianak ini disesuaikan dengan isu strategis yang menjadi fokus kajian. Data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk :

- a. Narasi, yaitu penyajian data dalam bentuk narasi ke dalam sebuah paragraf, digunakan untuk menyajikan data kualitatif;
- b. Tabulasi, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel;
- c. Diagram, menyajikan data dalam bentuk diagram agar mudah untuk dipahami;

d. Peta, untuk menyajikan data - data dalam bentuk peta agar memudahkan analisis spasial.

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kecenderungan (*baseline trend analysis*), khususnya untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada data *time series*. Untuk memudahkan analisis spasial maka digunakan alat bantu (*tools*) SIG. Analisis ini dilakukan untuk merumuskan isu - isu strategis yang akan ditetapkan dan juga untuk analisis potensi dampak dan/atau resiko lingkungan hidup dari program yang dikaji dampak atau pengaruhnya.

Guna memudahkan pengkajian dan analisis, maka program - program yang terpilih dari daftar program yang termuat dalam dokumen RPJPD Kota Pontianak dikelompokkan/digabungkan menjadi kelompok/program terpilih. Program - program yang dipilih adalah program yang mempunyai potensi dampak negatif signifikan terhadap isu sosial - budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Sebagaimana mengacu UUPPLH Pasal 15 Ayat 3, KLHS tata ruang diselenggarakan dengan mekanisme :

- a. Pengkajian pengaruh RPJPD terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan substansi RPJPD;
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan penyempurnaan RPJPD yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketiga mekanisme tersebut secara rinci dilaksanakan dengan metoda dan teknis pengkajian/analisis sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Kajian Pengaruh RPJPD terhadap Kondisi Lingkungan Hidup. Pengkajian RPJPD terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya adalah :

- Untuk menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UUPPLH.

- Untuk menjamin bahwa hasil perencanaan RPJPD memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik.
- Agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.
- Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat dilakukan sesuai proses dan prosedur penyusunan RPJPD, yang dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Pengelompokan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

| Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya | Lembaga |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembuat Keputusan | <ul style="list-style-type: none"> • Walikota • DPRD |
| Penyusun RPJPD | BAPPEDA |
| Instansi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan • Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok) | <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya • Asosiasi profesi • Forum-form pembangunan |

| Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya | Lembaga |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | berkelanjutan dan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • LSM Pemerhati Lingkungan Hidup |
| Masyarakat yang Terkena Dampak | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Adat • Asosiasi Pengusaha • Tokoh Masyarakat • Organisasi masyarakat/ Kelompok masyarakat tertentu |

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, 2010

Identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga harus memastikan bahwa tidak seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan. Perlu dilakukan pemetaan pemangku kepentingan untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap RPJPD Kota Pontianak. Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu melibatkan mereka yang peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat disesuaikan dengan proses perumusan kebijakan, rencana dan/atau program.

Apabila diperlukan dapat dibentuk pengelompokan (*clustering*) masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan permasalahan yang akan didiskusikan. Setiap kelompok dapat dibantu oleh tim atau yang sejenis untuk menyiapkan bahan dan materi yang didiskusikan dan menyimpulkan serta merumuskan masukan, informasi, dan pertimbangan berdasarkan diskusi dan dialog yang dilakukan untuk bahan pertimbangan pemrakarsa rencana. Tim atau yang sejenis dapat dipilih di antara perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat dibantu nara sumber sesuai keperluan. Mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya ini dapat dilakukan melalui publikasi,

dialog, diskusi, dan konsultasi publik, sebagaimana yang telah diatur dalam masing - masing proses dan prosedur perencanaan RPJPD Kota Pontianak.

2. Identifikasi isu - isu pembangunan berkelanjutan yang relevan dan signifikan di wilayah perencanaan. Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah :
 - a. Menetapkan isu - isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup atau keterkaitan antar ketiga aspek tersebut, berdasarkan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan yang menjadi perhatian di wilayah tersebut dan untuk menjadi bahan kajian pengaruh RPJPD;
 - b. Membahas isu secara terfokus dan signifikan;
 - c. Membantu menentukan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai acuan bagi penentuan dan/atau penilaian substansi RPJPD.

Formulasi atau perumusan isu - isu pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui 5 (lima) tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi isu - isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan;
- b. Pengelompokan isu - isu pembangunan berkelanjutan dalam kluster - kluster isu;
- c. Konfirmasi isu - isu pembangunan berkelanjutan dengan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang tersedia;
- d. Jika diperlukan dan disepakati, dilakukan kajian khusus untuk isu - isu tertentu yang dianggap penting atau diperdebatkan;
- e. Penetapan isu - isu pembangunan berkelanjutan yang akan dijadikan dasar bagi kajian pengaruh RPJPD.

Isu - isu pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi difokuskan pada isu - isu yang relevan dan signifikan sehingga kajian pengaruh RPJPD dapat dilakukan lebih tajam. Identifikasi isu - isu



pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan masukan pakar atau data dan informasi yang tersedia. Pemangku kepentingan yang dilibatkan memberikan informasi dan konfirmasi atas isu - isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian utama. Identifikasi isu - isu pembangunan berkelanjutan ini merupakan proses awal pelingkupan dan menjadi dasar pelaksanaan KLHS selanjutnya.

3. Identifikasi muatan RPJPD yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap isu - isu pembangunan berkelanjutan di wilayah perencanaan. Tujuan identifikasi muatan RPJPD adalah :

- a. Mengetahui dan menentukan muatan dan substansi RPJPD yang perlu ditelaah pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan aspek pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengevaluasi muatan dan substansi RPJPD yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Patut dikenali bahwa RPJPD yang akan dilakukan KLHS terhadapnya memiliki unsur korelasi antara substansi di dalamnya. Untuk itu perlu dikenali pada tingkatan apa RPJPD dapat berpengaruh dari masukan isu pembangunan berkelanjutan.

4. Telaah pengaruh RPJPD terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Tujuan telaahan pengaruh RPJPD terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah adalah mengetahui kemungkinan dampak RPJPD terhadap isu - isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan RPJPD terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami apa saja komponen dalam RPJPD yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Telaahan pengaruh dapat mengarah pada :

- a. Uji konsistensi RPJPD sebagai suatu dokumen perencanaan;



- b. Uji spasial RPJPD terutama untuk mengamati dari sisi pemetaan dan visual;
- c. Uji tertentu lainnya seperti misalnya mengenai status lahan, persoalan lingkungan hidup yang harus diselesaikan karena konflik pemanfaatan ruang atau data prediksi yang jelas arahnya.

Sesuai UUPPLH Pasal 16, apabila dimungkinkan, kajian pengaruh dapat dilakukan secara lebih detil dengan menggunakan antara lain salah satu atau kombinasi dari kajian - kajian berikut ini :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
5. Perumusan Alternatif Penyempurnaan RPJPD. Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan RPJPD adalah untuk mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan RPJPD dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian pengaruh RPJPD terhadap isu - isu pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah, dan disepakati bahwa RPJPD yang dikaji potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan beberapa alternatif untuk menyempurnakan RPJPD yang ada atau yang sedang dalam proses penyusunan. Beberapa alternatif untuk menyempurnakan RPJPD ini dikembangkan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. Memberikan arahan atau rambu - rambu mitigasi terkait dengan RPJPD yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah - kaidah pembangunan berkelanjutan;



- b. Menyesuaikan ukuran, skala dan lokasi usulan perbaikan substansi RPJPD;
- c. Menunda, memperbaiki urutan atau waktu, atau mengubah prioritas pelaksanaan RPJPD;
- d. Mengubah muatan RPJPD.

Bentuk alternatif penyempurnaan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kebutuhan pembangunan : mengecek kembali atau membuat skenario pengembangan tata ruang yang baru (misalnya target - target dalam perekonomian wilayah atau kebutuhan ruang);
 - b. Lokasi : mengusulkan lokasi baru bagi suatu pemanfaatan ruang yang dianggap lebih aman, atau mengusulkan pengurangan luas suatu pemanfaatan ruang;
 - c. Proses, metode dan teknologi : mengusulkan alternatif proses dan/atau metode dan/atau teknologi pembangunan yang lebih baik, seperti misalnya peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan pembangunan ekonomi konvensional yang menguras sumber daya alam, seperti misalnya pembuatan jembatan untuk melintasi kawasan lindung;
 - d. Jangka waktu dan tahapan pembangunan : mengusulkan perubahan jangka waktu pembangunan, baik awal kegiatan pembangunan, urutan, maupun kemungkinan penundaan satu program pembangunan;
 - e. Berbagai kemungkinan pengembangan alternatif sebagaimana disebutkan di atas, secara cepat dan sederhana dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan atau memanfaatkan pandangan para ahli.
6. Rekomendasi Perbaikan RPJPD dan Pengintegrasian Hasil KLHS. Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan perbaikan muatan RPJPD berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan RPJPD. Mengacu ketentuan dalam UUPPLH, rekomendasi perbaikan RPJPD ini dapat berupa :
- a. Perbaikan rumusan tujuan /kebijakan dalam RPJPD;

- b. Perbaiki muatan rencana dalam RPJPD;
- c. Perbaiki materi program dan ketentuan peraturan zonasi dalam RPJPD.

Pada saat penyusunan rekomendasi perbaikan RPJPD tersebut juga sudah mempertimbangkan rambu - rambu mitigasi terkait dengan substansi yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah - kaidah pembangunan berkelanjutan.

1.5 PELAKSANAAN KLHS

Proses tahapan KLHS Penyusunan RPJPD Kota Pontianak sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan. Ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu :
 - a. Menetapkan anggota Pokja Pengendalian Lingkungan dengan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak
 - b. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada SKPD yang terkait di Kota Pontianak yang berisikan pengantar mengenai materi KLHS RPJPD.
2. Tahap Pra Pelingkupan.

Dalam tahapan ini Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan identifikasi terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi) untuk mendapatkan daftar panjang termasuk lingkup wilayah dan kebutuhan data/informasi pendukung dalam proses KLHS, serta para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS.
3. Tahap Pelingkupan



Tahap pelingkupan dilakukan dalam bentuk workshop dengan mengundang para pemangku kepentingan guna melakukan verifikasi dan melakukan penapisan isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi isu-isu strategis.

4. Tahap Identifikasi dan Analisis Data

Tahap Identifikasi dan Analisa Data atau yang biasa kita sebut dengan Analisis Baseline Data bertujuan untuk memberikan gambaran Pola kecenderungan isu-isu strategis KLHS; Faktor pendorong terjadinya isu-isu strategis; Perkiraan dampak pada skenario *Bussines as Usual*. Baseline Data berfungsi fungsi sebagai informasi awal untuk digunakan dalam proses pengkajian pengaruh.

5. Tahap Kajian Pengkajian

Selanjutnya Pokja Pengendalian Lingkungan bersama dengan para pemangku kepentingan melakukan kajian pengaruh dan perumusan alternatif dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap muatan rancangan awal RPJPD (visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan); serta melakukan penapisan program-program utama prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis KLHS. Kajian pengaruh dan perumusan alternatif juga mengundang para pakar untuk memberikan masukan terhadap hasil kerja Pokja Pengendalian Lingkungan.

6. Tahapan Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif;

Tahapan mitigasi dan/atau alternatif merupakan kajian lanjutan yang menunjukkan beberapa kebijakan, rencana dan/atau program yang ada di Kota Pontianak berdampak positif, sebagian lainnya memiliki dampak negatif terhadap isu strategis. Akan tetapi diperlukan pengkajian lebih jauh lagi untuk melihat berapa besar dampak dari Kebijakan tersebut terhadap isu strategis.

7. Tahap Rekomendasi

Pada tahapan rekomendasi, program-program yang berpengaruh terhadap isu-isu strategis KLHS akan diberikan rekomendasi perbaikan yang merupakan rangkuman dari mitigasi dan/atau alternatif.

1.6 KENDALA DALAM PELAKSANAAN KLHS

Pelaksanaan KLHS RPJPD Kota Pontianak pada dasarnya menggunakan acuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain :

- a. Terbatasnya data sekunder/data instansional yang diperlukan pada tahap pra pelingkupan dan tahap penyusunan data dasar (*baseline data*);
- b. Terbatasnya waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyusunan KLHS RPJP Kota Pontianak;
- c. Identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik, namun demikian kehadiran pada saat pelaksanaan workshop tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KLHS

Sistematika penulisan laporan pelaksanaan KLHS RPJPD Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran KLHS, landasan hukum, lingkup kegiatan pelaksanaan KLHS, kendala-kendala dalam pelaksanaan KLHS dan sistematika penulisan laporan.

BAB II PROFIL WILAYAH KAJIAN

Bab ini membahas tentang Profil Kota Pontianak mulai dari Tata Letak, Fisiografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya hingga Ringkasan RPJPD Kota Pontianak 2005-2025.

BAB III PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS

Pada bab ini akan membahas hasil dari seluruh tahapan pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan yaitu tahap Persiapan, Pra Pelingkupan, Pelingkupan,



Identifikasi dan Analisis Data, Pengkajian, Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif dan Rekomendasi.

BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AWAL RPJPD KOTA PONTIANAK

Pada bab ini akan membahas prinsip-prinsip mengenai Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJPD Kota Pontianak.

Bab V HASIL PENGAWASAN MUTU

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengawasan mutu berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2012.

Bab VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan membahas kesimpulan bersifat makro (saran tindak) dari seluruh tahapan pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan.



BAB 2

PROFIL WILAYAH KAJIAN

2.1 LETAK DAN KONDISI IKLIM KOTA PONTIANAK

2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luasnya 107,82 Km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi oleh garis khatulistiwa yaitu pada 0° 02' 24" Lintang Utara sampai 0° 05' 37" Lintang Selatan dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan garis lintang, maka Kota Pontianak dilalui garis khatulistiwa. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0.1-1,5 m diatas permukaan laut.

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Bagian Utara | : | Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak |
| Bagian Selatan | : | Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. |
| Bagian Barat | : | Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. |
| Bagian Timur | : | Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. |

Letak Kota Pontianak yang berada di muara Sungai Kapuas menjadikan Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan yang strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi kabupaten-kabupaten lain yang dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten lain

2.1.2 Kondisi Iklim Kota Pontianak

Hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2016 temperatur udara di Kota Pontianak berkisar antara 23,40°C hingga 35,8°C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya sebesar 1.011,2 milibar. Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 2,1 knot hingga 2,7 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 30 knot.

Selama tahun 2015 hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari yaitu sebanyak 28 hari. Sedangkan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei dengan curah hujan sebesar 433,3 mm.

Tabel 2.1 Suhu Udara, Kelembaban, dan Tekanan Udara di Kota Pontianak, 2016

| Bulan | Suhu Udara (°C) | | | Rata-rata Kelembaban | Rata-rata Tekanan Udara (mbr) |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| | Minimum | Maksimum | Rata-rata | | |
| Januari | 24,0 | 32,6 | 27,5 | 84,0 | 1.012,4 |
| Februari | 24,4 | 32,4 | 27,3 | 85,0 | 1.012,1 |
| Maret | 24,7 | 33,7 | 28,2 | 82,0 | 1.012,4 |
| April | 24,8 | 33,8 | 28,4 | 81,0 | 1.010,9 |
| Mei | 24,7 | 33,9 | 28,0 | 84,0 | 1.010,5 |
| Juni | 24,3 | 33,9 | 28,2 | 80,0 | 1.011,5 |
| Juli | 24,7 | 34,4 | 28,5 | 79,0 | 1.010,9 |
| Agustus | 25,1 | 35,8 | 29,5 | 73,0 | 1.010,5 |
| September | 24,5 | 34,5 | 28,5 | 78,0 | 1.010,9 |
| Oktober | 24,4 | 33,4 | 27,8 | 81,0 | 1.010,8 |
| November | 24,4 | 32,5 | 27,1 | 86,0 | 1.010,8 |
| Desember | 23,4 | 31,7 | 27,3 | 84,0 | 1.010,1 |
| Rata-rata | 24,5 | 33,5 | 28,0 | 81,4 | 1.011,2 |

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2017, BPS.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak

2.2 FISOGRAFI KOTA PONTIANAK

2.2.1 Kondisi Topografi Kota Pontianak

Kota Pontianak terletak di delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2%.

Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0°00'55" LU dan 109°02'20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi salah satu urat nadi transportasi orang dan barang yang menghubungkan Kota Pontianak dengan wilayah pedalaman.

2.2.2 Geologi dan Jenis Tanah Kota Pontianak

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah.

Jenis batuan yang ada berupa batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari sedimen, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary.

Komposisi tanah di sepanjang sungai merupakan terbentuk dari proses pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluvent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluvent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk, termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

2.2.3 Hidrologi Kota Pontianak

Kota Pontianak terbagi menjadi 3 bagian daratan oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut sistem jaringan drainase dibentuk oleh 3 sungai besar, saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional.

Mengingat dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 sub`istem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Belitung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA. Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusannya.

Tabel 2.2 Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak

| No | Kecamatan | Sungai/Parit | |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pontianak Selatan | Parit Bansir Parit Besar | Parit Tokaya Sungai Kapuas Kecil |
| 2. | Pontianak Tenggara | Parit Bangka Parit Haji Husin | Sungai Raya |
| 3. | Pontianak Timur | Parit Bating Parit Daeng Lasibak Parit Haji Yusuf Karim Parit Japon Parit Kongsi Parit Langgar Parit Mayor Parit Pangeran Pati Parit Semerakai Parit Tambelan | Parit Wan Bakar Kapur Parit H. Yusuf Parit Jalil Parit Norman Sungai Kapuas Besar Sungai Kapuas Kecil Sugai Landak Sungai Kapitan Sungai jenggot |
| 4. | Pontianak Barat | Sungai Nipah Kuning Parit Sungai Jawi Parit Sungai Kapuas Sungai Kapuas Besar Parit Labala | Sungai Sero Parit Tengah Sungai Beliung Sungai Selamat |
| 5. | Pontianak Kota | Parit Besar Parit Sungai Jawi Parit Sungai Bangkong | Parit Sungai Kakap Sungai Kapuas Besar |
| 6. | Pontianak Utara | Parit Jawa Parit Makmur | Sungai Kapuas Besar Sungai Landak |



| No | Kecamatan | Sungai/Parit | |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Parit Malaya Parit Nanas Parit Pangeran Parit Sungai Kunyit Parit Sungai Putat Parit Sungai Sahang Parit Sungai Selamat Parit Wan Salim | Sungai Kuning Parit Pak Kacong Parit Pekong Parit Lie Parit Belanda Parit Cekwan Sungai Pandan Parit Pangeran II |

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2017, BPS

2.3 KONDISI EKONOMI KOTA PONTIANAK

2.3.1 Pertumbuhan PDRB Kota Pontianak

Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Pontianak tahun 2015 sebesar 4,99 persen dan pada tahun 2016 sebesar 5,10 perse. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 19,07 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,36 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB di tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan Lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,78 persen. Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,68 persen, lapangan usaha Real Estate mencatat sebesar 6,25 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,00 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,57 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 4,48 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,34 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,23 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,56 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,57 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,73 persen. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,08 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 3,71 persen dan lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 1,80 persen.

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
(Persen), 2012-2016**

| No. | Lapangan Usaha/ Industri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,78 | 4,38 | 3,92 | 2,55 | 3,71 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - |
| C | Industri Pengolahan | 6,17 | 6,86 | 2,77 | 2,39 | 4,34 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,54 | -2,64 | 13,58 | 5,64 | 19,07 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,99 | 1,70 | 4,40 | 3,62 | 8,78 |
| F | Konstruksi | 12,88 | 13,94 | 10,50 | 8,85 | 1,80 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,97 | 7,66 | 3,61 | 5,79 | 5,08 |
| H | Transportasi dan Perudangan | 6,01 | 6,77 | 5,97 | 3,85 | 6,00 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,41 | 6,99 | 5,55 | 5,13 | 7,57 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 13,53 | 9,38 | 10,88 | 11,07 | 10,36 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,13 | 13,38 | 4,93 | 2,09 | 7,56 |
| L | Real Estat | 7,49 | 7,52 | 6,16 | 3,48 | 6,25 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 8,57 | 8,20 | 5,06 | 6,93 | 7,68 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 9,78 | -5,50 | 4,82 | 5,57 | 7,73 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,02 | 8,50 | 5,37 | 3,36 | 3,23 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,82 | 3,51 | 4,65 | 4,13 | 4,57 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 1,57 | 1,55 | 5,66 | 3,24 | 4,48 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 5,05 | 7,77 | 5,54 | 4,99 | 5,10 |

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, BPS

2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pontianak sebesar Rp 42,70 juta dan tahun 2015 sebesar Rp 46,68 juta dan tahun 2016 sebesar 50,16 juta dengan pertumbuhan sebesar 6,00 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2012 - 2016 berturut-turut sebesar 12,66 persen; dan 13,40 persen, 10,00 persen, 8,00 persen dan 6,00 persen.

Tabel 2.4 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2012-2016

| No. | Lapangan Usaha/ Industri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - |
| C | Industri Pengolahan | 6,14 | 6,77 | 7,30 | 7,60 | 8,31 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| F | Konstruksi | 4,85 | 5,90 | 6,87 | 7,99 | 8,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,65 | 7,36 | 7,99 | 8,79 | 9,33 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,16 | 3,48 | 3,79 | 4,10 | 4,45 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,57 | 1,73 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,45 | 1,50 | 1,62 | 1,79 | 1,96 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,96 | 3,49 | 3,80 | 4,02 | 4,44 |
| L | Real Estat | 0,93 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,29 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,33 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2,30 | 2,73 | 3,17 | 3,61 | 4,10 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,34 | 2,73 | 3,00 | 3,18 | 3,37 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,83 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,70 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,90 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 34,18 | 38,70 | 42,70 | 46,68 | 50,16 |

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, BPS

2.4 KONDISI DEMOGRAFI KOTA PONTIANAK

2.4.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak 618.388 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.736 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 10.459 jiwa/ km², sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.349 jiwa per km².

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990-2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen per tahun. Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio yang rata-rata bernilai 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2016

| Kecamatan | Luas Wilayah | | Penduduk (Orang) | | Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²) |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|
| | Km ² | % | Jumlah | % | |
| Pontianak Selatan | 15,14 | 14,04 | 92.952 | 15,03 | 6.139 |
| Pontianak Tenggara | 14,22 | 13,19 | 50.038 | 8,09 | 3.519 |
| Pontianak Timur | 8,78 | 8,14 | 91.830 | 14,85 | 10.459 |
| Pontianak Barat | 16,47 | 15,28 | 136.805 | 22,12 | 8.306 |
| Pontianak Kota | 15,98 | 14,82 | 122.118 | 19,75 | 7.642 |
| Pontianak Utara | 37,22 | 34,52 | 124.645 | 20,16 | 3.349 |
| Kota Pontianak | 107,81 | 100,00 | 618.388 | 100,00 | 5.736 |

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2017, BPS

2.4.2 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 1 tahun atau lebih, terdiri dari :

1. Angkatan Kerja yaitu bekerja dan pengangguran
2. Bukan Angkatan Kerja yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (pensiun, jompo, dll).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 adalah 278.764 jiwa atau sebesar 61,89 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 172.160 orang (61,75 persen), dan penduduk perempuan sebanyak 106.604 orang (38,24 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Pontianak relatif didominasi oleh pekerja laki-laki.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Pontianak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran Kota Pontianak adalah sebesar 9,44 persen atau sekitar 26.325 orang dari 278.764 angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran di Kota Pontianak didominasi oleh tamatan SLTA ke atas.

Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Pontianak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, UMR yang ditetapkan untuk Kota Pontianak adalah Rp1.815.000,- atau naik sebesar Rp190.000,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UMR ini merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya.

Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pontianak, 2015

| No | Jenis Kegiatan | Tingkat Pendidikan | | | | | Total |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| | | SD Ke Bawah | SMP Sederajat | SMK | SMA Sederajat | Perguruan Tinggi | |
| 1. | Bekerja | 69.864 | 29.757 | 32.346 | 68.887 | 51.585 | 252.439 |
| 2. | Pengangguran | 8.643 | 3.625 | 3.232 | 7.404 | 3.421 | 26.325 |
| Angkatan Kerja | | 78.507 | 33.382 | 35.578 | 76.291 | 55.006 | 278.764 |
| 3. | Sekolah | 5.538 | 27.272 | 2.973 | 16.659 | 808 | 53.250 |
| 4. | Mengurus Rumah Tangga | 36.531 | 16.420 | 8.102 | 22.541 | 9.462 | 93.056 |
| 5. | Lainnya | 12.596 | 3.021 | 3.296 | 5.154 | 1.255 | 25.322 |
| Bukan Angkatan Kerja | | 54.665 | 46.713 | 14.371 | 44.354 | 11.525 | 71.628 |
| Jumlah | | 133.172 | 80.095 | 49.949 | 120.645 | 66.531 | |

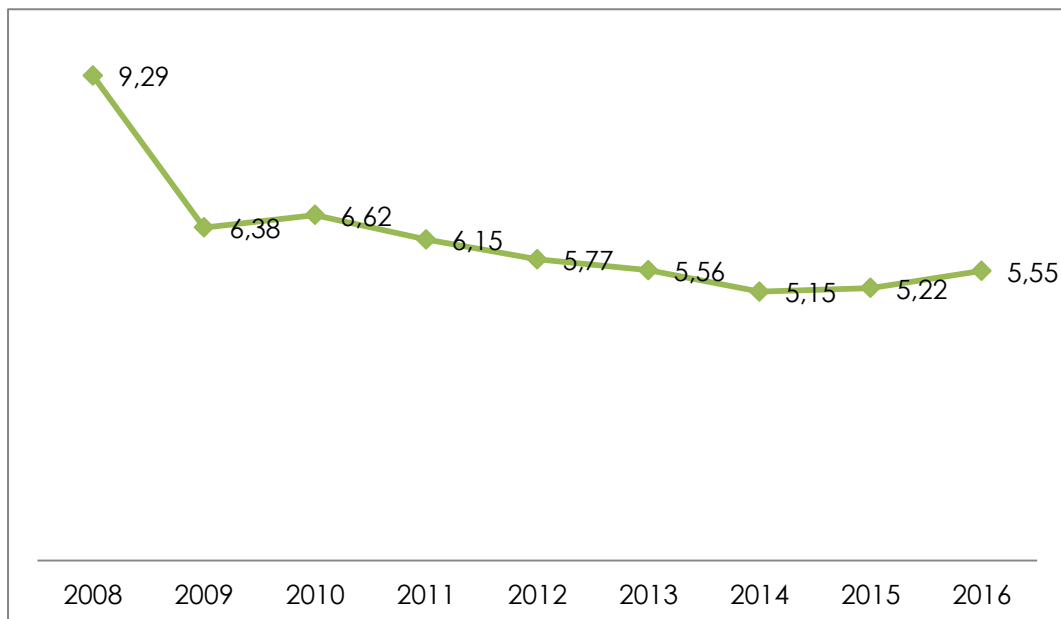
Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2017, BPS

2.5 KONDISI SOSIAL KOTA PONTIANAK

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan penduduk termasuk di dalam kategori miskin atau tidak, dimana garis kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun ke tahun jumlahnya cukup berfluktuatif. Pada tahun 2016, BPS Kota Pontianak mencatat ada sekitar 5,55 persen penduduk miskin di Kota Pontianak, dimana tahun 2016 rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita perbulannya dibawah garis kemiskinan sebesar Rp 427.783,-.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin di Kota Pontianak 2008-2016



2.6 RINGKASAN RPJP KOTA PONTIANAK TAHUN 2005-2025

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan umum dan bersifat makro pembangunan daerah yang merupakan jabaran pembangunan kota Pontianak dalam upaya mencapai visi, misi, dan arah pembangunan daerah

untuk periode perencanaan 20 tahun ke depan. Dokumen perencanaan ini untuk mengikat kesinambungan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah, agar kesinambungan dan konsistensi kebijakan daerah bisa lebih terjamin. Kesinambungan dan konsistensi kebijakan tidak hanya menjadi harapan investor, tetapi masyarakat dan perangkat daerah tidak menimbulkan kebingungan.

Visi dan misi disini adalah visi -misi daerah yang akan dipakai sebagai pedoman calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Penjabaran lebih detail RPJP akan diterjemahkan dalam RPJM setiap pelantikan dan pergantian kepala daerah, berikutnya akan diikuti dengan perubahan rencana strategis (renstra) masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan tiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diikuti dengan rencana penganggaran.

2.6.1 Visi Misi

a. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan



strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk jangka waktu 2005-2025 adalah “**Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Di Kalimantan Tahun 2025**”.

Kalimat visi Kota Pontianak mengandung empat kata kunci yaitu kota khatulistiwa, sejahtera, berwawasan lingkungan, perdagangan dan jasa. Keempat kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kota Khatulistiwa**, punya pengertian bahwa ciri khas Kota Pontianak dilewati garis khatulistiwa dan tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia.
2. **Berwawasan lingkungan**, punya pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. **Lingkungan** mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian **berwawasan lingkungan** adalah sebagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Visi ini dilakukan uji publik untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan akan ketetapan tujuan serta mengikat komitmen kepada banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi ini mempunyai jабaran ke dalam misi yang dilakukan uji publik untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
3. **Terdepan di Kalimantan**, mempunyai pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki keunggulan dari kota lain di Kalimantan. Pengertian keunggulan ini adalah



keunggulan dalam pengelolaan sumber daya dan hasil yang dicapai diberbagai bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang lingkungan hidup, bidang tata pemerintahan, keamanan dan ketertiban.

b. Misi

Misi merupakan kalimat kerja dalam upaya untuk mencapai visi, maka perlu suatu bahasan yang relatif panjang dan perlu diuji. Misi Kota Pontianak :

1. **Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kebangsaan Yang Sehat, Cerdas, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia** adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehat jasmani dan rohani, usia harapan hidup mencapai 70 tahun, IPM mencapai 81,99, memiliki jati diri, melaksanakan interaksi antarbudaya, menerapkan nilai-nilai luhur, memiliki budi pekerti yang baik, jujur, berani bertanggung jawab dan santun, penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. **Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya Dan Terjamin Hak-Hak Warga** adalah masyarakat yang menegakan supremasi sipil yang mandiri, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak lebih dari 5 persen, mendapat jaminan sosial dan dapat mengakses berbagai bidang kehidupan terutama bidang ekonomi, hak asasi, pendidikan dan kesehatan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai gerakan bersama.
3. **Mewujudkan Perekonomian Yang Stabil, Tumbuh, dan Merata Berbasis Ekonomi Kerakyatan** adalah mengedepankan pembangunan ekonomi yang stabil, tumbuh dan merata, secara berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan sektor andalan perdagangan, jasa dan industri melalui pemanfaatan kemajuan

iptek; menciptakan iklim investasi (penanaman modal) yang kondusif, memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan, kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

4. **Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan** adalah sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan dibangun sesuai kebutuhan dan tuntutan perdagangan, jasa dan masyarakat dan diharapkan tidak hanya untuk pertumbuhan kota, tetapi harus berorientasi terhadap daya dukung dan pertimbangan keseimbangan lingkungan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik, Taat Hukum, Tenram, dan Tertib.** Pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, taat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.

2.6.2 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah merupakan bagian akhir dari isi RPJP dan diharapkan pembangunan tidak salah arah .

A. Terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, berbudaya dan beradab serta berwawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan hal ini maka arah pembangunan yang akan ditempuh adalah :

1. Seluruh lapisan masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanah UUD 1945 secara bertahap, meningkatkan



penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dari SD s/d SMA yang layak dan sesuai kebutuhan masyarakat, memberikan pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui kelancaraan proses sertifikasi, mengupayakan proses pembelajaran yang makin efektif dan peningkatan variasi materi lokal yang sesuai dengan visi dan misi Kota Pontianak melalui pelatihan-pelatihan, mengupayakan peningkatan keragaman ketrampilan lulusan SMK melalui berbagai kerjasama dan magang dengan dunia usaha yang lebih intensif dan partisipatif serta mengurangi buta aksara melalui program pendidikan luar sekolah yang terus menerus dengan mendorong partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat di bidang pelayanan pendidikan secara maksimal.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, terjangkau dan tidak diskriminatif untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan anggaran kesehatan dari APBD sebesar 15 persen secara bertahap, ada upaya maksimal untuk menggratiskan pelayanan kesehatan secara bertahap bagi keluarga miskin, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang makin memadai, meningkatkan dan mendorong partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, memperbanyak dokter spesialis sesuai kebutuhan, terus mengupayakan pelayanan puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam secara optimal, meminimalkan penyakin epidemis demam berdarah, muntaber, dan diare, menumbuhkan gerakan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi untuk bayi dan balita serta peningkatan kesiapan mengatasi HIV/ AIDS, NAPZA, dan Flu Burung.
3. Mengembangkan dan membudayakan keteladanan para pemimpin di semua lapisan masyarakat, peningkatan budaya patuh pada hukum di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan budaya patuh pada hukum di seluruh lapisan masyarakat melalui penyuluhan dan gerakan sadar hukum, peningkatan apresiasi seni dan budaya

daerah untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa yang makin patriotik, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, menumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global, penggalian budaya daerah yang potensial sebagai kekayaan daerah, pembinaan dan peningkatan partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat terhadap insan pengembang dan pelestari budaya secara maksimal serta mengupayakan pengenalan budaya luhur sejak dini melalui pendidikan.

B. Terwujudnya masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga yang ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung yang mencakup berbagai bidang kehidupan, terus memperjuangkan hak-hak perempuan, berupaya meminimalkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, peningkatan perlindungan tenaga kerja perempuan, meningkatkan kemudahan akses perempuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya, peningkatan perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan membantu upaya pemasaran produk-produk yang mereka hasilkan melalui bantuan modal dan pemasaran. Disamping itu, pemerintah harus terus berupaya mendorong swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung.
2. Peningkatan kepedulian swasta dan masyarakat dalam penanggulangan masalah-masalah kependudukan seperti kriminalitas dan kekumuhan kota perhatian terhadap pemerataan



penyebaran penduduk antar kecamatan, penguatan kembali Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen/ tahun, pengendalian migrasi ke Kota Pontianak dan peningkatan tertib administrasi kependudukan yang mantap.

3. Peningkatan kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS (Penyandang Masalah dan Kesejahteraan Sosial) melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, tepat waktu dan sasaran dalam pelaksanaan program, penyediaan dana pendampingan untuk pembinaan penduduk miskin, menghilangkan pandangan bahwa penanggulangan masalah kemiskinan hanya menjadi tugas pemerintah dan peningkatan keakuratan data kemiskinan, sehingga angka kemiskinan tidak lebuhi dari 5 persen, diupayakan pengendalian PMKS terutama gelandangan, pengemis, anak jalanan, PSK (Pekerja Seks Komersial), korban penyalahgunaan NAPZA dan banyaknya orang gila yang datang dari luar kota, peningkatan perhatian terhadap penyalahgunaan NAPZA dan HIV/ AIDS yang banyak diderita oleh generasi muda, peningkatan dukungan prasarana untuk anak dan usia lanjut terlantar serta pendataan PMKS yang belum akurat serta pembinaan generasi muda dengan fokus dampak negatif NAPZA dan HIV/ AIDS terhadap diri, keluarga dan masyarakat melalui olahraga dan budaya.

C. Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Perekonomian dikembangkan kearah memperkuat pondasi ekonomi Kota Pontianak yang berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi ekonomi yang berunggulan kompetitif sebagai berikut :



1. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai *leading sector*, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi.
3. Terwujudnya kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien, yang dilaksanakan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri.
4. Terwujudnya iklim investasi yang dapat mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing ekonomi Kota Pontianak.
5. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.
6. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat internasional.
7. Terwujudnya kondisi ketenagakerjaan yang *full employment* di Kota Pontianak.
8. Terwujudnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.
9. Terwujudnya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri.



10. Terwujudnya keharmonisan dan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan usaha besar.
11. Terwujudnya kondisi usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan golongan ekonomi menengah ke bawah.
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
13. Terwujudnya fasilitas perdagangan berupa trading house, mall, supermarket dan wujud pasar modern yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
14. Terwujudnya *Pontianak Town Square* (PTS) yang dapat mengakomodasi perkembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi serta berwawasan lingkungan.
15. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efektif dan efisien) melalui pelayanan satu atap.
16. Terwujudnya perdagangan yang dapat memperkokoh sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha.
17. Terwujudnya pariwisata daerah untuk mengembangkan ekonomi dan citra kebudayaan nasional melalui penyerapan Teknologi Informasi (TI) secara terkendali, peningkatan peranan jasa rekreasi dan olahraga, pengembangan nilai-nilai tradisional dan kesejahteraan guna meningkatkan jati diri serta nilai-nilai asli daerah dan bangsa Indonesia.
18. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.

D. Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, maka arah pembangunan yang akan ditempuh adalah :



1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase serta daerah resapan air yang mampu mengurangi genangan dan mencegah banjir di kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim.
2. Peningkatan kualitas jalan dan peningkatan kuantitas (ruas) jalan baru yang mampu mengimbangi mobilitas penduduk, pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Meningkatnya standard lebar jalan sesuai fungsi, daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoar (pejalan kaki) dan akses penyandang cacat.
3. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak hanya dengan anggaran pemerintah, tetapi juga operator swasta dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan.
4. Mewujudkan masyarakat dan keluarga miskin memiliki perumahan permukiman sehat yang dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, sarana persampahan dalam lingkungan yang sehat.
5. Meningkatkan kebutuhan masyarakat dan keluarga miskin terhadap akses air bersih yang cukup dari kualitas dan kuantitas terutama pada saat kemarau.
6. Meningkatkan layanan air bersih dari PDAM dan munculnya operator air bersih dari swasta agar tercapai efisiensi dan efektifitas cukup tinggi dan terjadi kompetisi yang sehat.
7. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, ditandai dengan setiap keluarga punya sarana sanitasi sendiri atau bersama, tinggal dalam lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta aman.
8. Meningkatkan pembangunan transportasi umum masal yang aman, nyaman, tanpa kemacetan dan efisiensi. Alternatif transportasi lebih banyak dalam upaya menunjang pertumbuhan wilayah dan ekonomi, seperti penyeberangan Batu Layang dan Nipah Kuning.
9. Mewujudkan prasarana transportasi antar moda yang terintegrasi antara transportasi darat ke transportasi udara dan transportasi air untuk antar pulau maupun ke pedalaman yang aman dan nyaman.



10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas listrik untuk keperluan perdagangan, jasa, industri, dan rumah tangga seiring pertumbuhan kota.
11. Mewujudkan kota dengan sumber energi alternatif yang inovatif untuk menunjang perdagangan, jasa, industri, dan rumah tangga.
12. Peningkatan perencanaan tata ruang untuk menunjang kota perdagangan, jasa yang berwawasan daya dukung dan keseimbangan lingkungan serta berkesinambungan.
13. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang mampu menciptakan pertumbuhan wilayah relatif sama (kesenjangan relatif kecil) dan memperhatikan fungsi lahan 30% untuk ruang terbuka hijau yang tersebar.
14. Peningkatan penataan ruang pada *hinterland* Kota Pontianak yang lebih serasi, sinergis antar wilayah kota dan kabupaten yang saling menciptakan keuntungan.
15. Meningkatkan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan ruang kota dan lebih konsisten untuk masyarakat menengah dan kelompok bawah agar lebih berkeadilan.
16. Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan tata ruang sesuai peraturan perundang-undang, daya dukung lingkungan dan semua pihak mempunyai komitmen untuk menggunakan cara preventif dalam pengendalian tata ruang.
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku agar tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan sehingga memenuhi syarat untuk diolah menjadi air bersih.
18. Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, swasta dan pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran untuk lebih sadar dan taat terhadap peraturan lingkungan serta munculnya kelompok sadar lingkungan dengan berbagai bentuk.



19. Meningkatkan kualitas lingkungan air dan udara tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan dan tetap tidak menghambat berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

E. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masyarakat yang paham politik, taat hukum tentram dan tertib yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Masyarakat yang paham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, beretika dan berbudaya.
2. Terwujudnya optimalisasi sinergi aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah :
 - a. Melakukan harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi kota.
 - b. Mengoptimalkan peran/ partisipasi masyarakat, pendayagunaan kelembagaan Panitia HAM Kota dan Panitia Legislasi dalam setiap penyusunan produk hukum daerah.
3. Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum.
4. Terwujudnya kemandirian dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang kemandirian dan ketertiban yang menuntut tanggung jawab bersama. Penggunaan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tepat sasaran sebagai upaya menciptakan kemandirian dan ketertiban.
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, organisasi yang efisien dan efektif melalui penataan struktur organisasi yang lebih rasional dan realistis guna mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Disamping itu terwujudnya derajat optimalisasi anggaran berbasis kinerja serta mensinergikan APBD



yang diarahkan untuk memperbesar anggaran publik dan memperkecil anggaran aparatur.

BAB 3

PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS

Proses tahapan KLHS Penyusunan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

3.1 TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam tahapan ini telah dilakukan 4 kegiatan, yaitu (1) Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan (2) Bimbingan Teknis, (3) Mengeidentifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS, dan (4) Pra Pelingkupan.

Anggota Pokja pengendalian Lingkungan berada di Bappeda yang sebagian anggotanya merupakan Tim Penyusun RPJPD dan perwakilan dari beberapa SKPD. Dalam proses penyusunan KLHS, Pokja mendapatkan arahan dan masukan dari tim pendamping ahli. Dengan sistem seperti ini didapatkan

sinergitas antara Tim Penyusun RPJPD dengan Pokja Pengendalian Lingkungan sebagai mitranya sekaligus muatan substansinya dapat dikoreksi dengan pertimbangan akademik. Dalam prosesnya terdapat timbal balik informasi dan data untuk memastikan proses KLHS berjalan semestinya. Untuk meningkatkan kapasitas penyusunan KLHS anggota Pokja telah melakukan bimbingan teknis untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana melakukan proses KLHS.

Seperti telah disampaikan sebelumnya pada laporan pendahuluan bahwa proses pelaksanaan KLHS ini berjalan secara paralel dengan RPJPD Kota Pontianak 2005-2025. Dengan demikian, proses KLHS yang dilakukan mengadaptasi mekanisme RPJPD. Adopsi mekanisme RPJPD tidak berarti penyusunan KLHS tergantung seluruhnya dari keseluruhan proses RPJPD, namun lebih bersifat mengintegrasikan tahapannya agar dapat memberikan masukan yang signifikan dalam proses penyusunan RPJPD.

Sebagai contoh, identifikasi isu-isu strategis *long list* dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan kerangka masalah dan tujuan yang lebih jelas bagi arah pembangunan Kota Pontianak sampai tahun 2025. Dapat dikatakan bahwa pengintegrasian ini meliputi integrasi proses/prosedural dan integrasi substansial.

Pelaksanaan KLHS RPJPD Kota Pontianak dengan pemahaman di atas menggunakan pendekatan:

- a. Sistematisa metode analisis ilmiah yang menekankan pada filosofi KLHS dan menghasilkan substansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Sistematisa prosedural formal dengan berlandaskan pada pemahaman filosofi dan substansial KLHS;
- c. Melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, perguruan tinggi, komunitas/Non Government Organization, budayawan, pengusaha, dan sebagainya.

Metode analisis ilmiah ini mengandung makna bahwa segala macam pencarian data dan informasi serta ekstraksi dari data dan informasi

tersebut dilakukan dengan dasar ilmiah. Upaya ini dilakukan agar proses KLHS dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dalam aspek substansi ini, metode-metode analisis yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat spesifik untuk setiap substansi isu. Pilihan metode yang dapat digunakan antara lain adalah: (a) Metode Cepat (*Quick Appraisal* atau *Rapid Assesment*); (b) Metode Semi Detil (*Semi Detail Assesment*); dan (c) Metode Detil (*Detail Assesment*). Dalam kajian ini, metode yang digunakan disesuaikan dan ditentukan oleh konteks, kondisi, dan jenis KRP yang akan di-asses. Berikut ini diuraikan tiga pilihan metode yang dapat digunakan dalam proses KLHS :

a. Metode Cepat (Quick Appraisal atau Rapid Assesment)

Metode cepat atau *quick appraisal* merupakan metode kajian yang lebih mengandalkan pengalaman dan pandangan para pakar (*professional judgement*) dan cenderung bersifat kualitatif. Metode ini digunakan apabila situasinya darurat, KRP membutuhkan penilaian yang cepat, waktu dan sumberdaya yang ada terbatas, serta tidak tersedia data yang cukup. Metode ini juga dipilih ketika satu KRP berada dalam tekanan publik dan perlu segera mendapatkan masukan KLHS. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya yang cepat (dapat dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan atau paling lama dua bulan, tergantung dari kompleksitas KRP-nya). Contoh metode yang dapat digunakan antara lain: analisis kualitatif, metode SPR (*State-Pressure-Response*), dan LFA.

b. Metode Semi Detil (Semi Detail Assesment)

Metode semi detil adalah kajian yang memanfaatkan data-data yang ada digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para ahli. Metode ini merupakan satu langkah lebih maju daripada metode cepat, dimana pandangan para pakar didasarkan pada dukungan data-data dan informasi yang cukup memadai, sehingga keputusannya lebih akurat dan dapat lebih bersifat kuantitatif. Metode semi-detil dipilih apabila KRP yang dikaji tidak begitu mendesak untuk diputuskan, tidak dalam tekanan publik, serta tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pakar. Metode ini dapat dilakukan

antara dua sampai empat bulan, tergantung kompleksitas KRP yang dikaji. Contoh penilaian dengan pendekatan/metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis-analisis statistik deskriptif dan analisis prospektif.

c. Metode Detil (Detail Assesment)

Metode detil adalah kajian menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif, rumit, dan kompleks yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Metode detil dilakukan untuk mengkaji beberapa isu spesifik yang dianggap penting dan sangat beresiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah yang sesuai prosedur. Metode detil dilakukan apabila KRP yang dikaji menimbulkan isu-isu penting dan komprehensif dan tidak segera harus diputuskan. Metode ini juga dipilih apabila pemrakarsa KRP mempunyai data dan sumberdaya yang melimpah untuk melaksanakan metode ini, sementara itu tekanan publik/politik tidak terlalu mendesak untuk memutuskan satu KRP. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar antara empat hingga enam bulan. Contoh analisis yang dapat digunakan pada metode ini misalnya dengan model-model sistem dinamik (*dynamics system modelling*), *causal statistics* (*econometrics*), dan lain-lain.

Proses dan prosedural formal mengandung makna bahwa proses pelaksanaan KLHS mengikuti procedural yang telah ditentukan oleh regulasi yang ada. Namun tentunya, proses dan prosedur ini harus berpijak pada filosofi dan substansi utama KLHS sehingga dokumen KLHS tidak akan kehilangan esensi sesungguhnya. Oleh karena itu, pendekatan proses/procedural mempertimbangkan aspek: *top down*, *bottom-up*, *participatory*, *consultative-interactive*, teknokratik, dan birokratik.

Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi esensial untuk membangun konsensus serta *selfassessment* yang menjadi bagian penting prinsip dari KLHS. KLHS bukanlah suatu prosedur legal biasa, namun ada upaya pembelajaran dari para pemangku kepentingan terkait. Pemenuhan tujuan-tujuan dari partisipasi masyarakat dan keterlibatan para pihak menjadi

kunci pokok keberhasilan KLHS. Proses partisipasi dan konsultasi publik/masyarakat serta kegiatan-kegiatan konsultasi maupun diskusi dengan para pihak dalam KLHS memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan bagi masyarakat dan para pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
2. Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah didominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakankalangan yang marginal;
3. Meningkatkan legitimasi KRP di mata masyarakat, sekaligus memastikan komitmen semua pihak dalam melaksanakan dan mentaati muatan-muatan aturannya.

3.2 TAHAP PRA PELINGKUPAN

Pra Pelingkupan merupakan proses KLHS untuk mengumpulkan isu-isu pembangunan di Kota Pontianak. Untuk memastikan bahwa isu-isu pembangunan telah mencakupi keseluruhan unsur yang berkepentingan, maka sebelum proses pengumpulan isu dilakukan, terlebih dahulu pemangku kepentingan diidentifikasi.

Proses pra pelingkupan pertama kali dilakukan secara internal oleh anggota Pokja dan para pemangku kepentingan. Hasil identifikasi isu-isu pembangunan kemudian diolah dan dideskripsikan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia. Pada tahap ini Pokja mengumpulkan data dan informasi dari SKPD dan stakeholder yang terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa isu strategis adalah benar-benar berasal dari pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan informasi. Dalam proses pra pelingkupan berdasarkan identifikasi isu-isu, Pokja mencoba menggali informasi tidak hanya dari pemangku kepentingan di tingkat Kota namun melibatkan pihak kecamatan untuk menjamin bahwa setiap isu benar-benar terjadi di wilayahnya. Dengan demikian isu-isu yang tergalil dapat dipertanggungjawabkan lokasi kejadiannya. Pada tahap ini pra pelingkupan dilakukan penjaringan dan melibatkan semua bidang yang ada dilingkup BAPPEDA Kota Pontianak dengan menggunakan kategori isu infrastruktur,



sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penjarangan selanjutnya melibatkan semua SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJPD Kota Pontianak didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut:

1. Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan Kota Pontianak, terutama kualitas air, banjir serta genangan, persampahan, alih fungsi lahan, serta kualitas udara.
2. Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu 20 tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas
3. Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan).

Kondisi di atas tidak hanya berbicara masalah lingkungan hidup semata, tetapi menakankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan karena UU Nomor 32 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b tentang dampak atau resiko terhadap Lingkungan Hidup diantaranya memberikan perhatian pada muatan sosial-ekonomi terutama pada butir 6 (enam) dan 7 (tujuh), yaitu:

1. Perubahan iklim : peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas dan frekuensi *extreme events*, dan lainnya;
2. Kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan kesejahteraan sekelompok masyarakat;
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Tidak semua muatan tersebut relevan dengan konteks Kota Pontianak, bahkan ada pembaruan yang perlu ditambahkan karena konteks perkotaan dengan morfologi fisik permukiman dan sosial ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan dengan administrasi kota. Dari hasil tahapan kajian ini diperoleh satu set daftar panjang (*long list*) yang dikelompokkan dalam beberapa isu tema pembangunan berkelanjutan dan berikut deskripsinya terlihat dalam tabel masing-masing bidang.

Tabel 3.1

Daftar Panjang Permasalahan

| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspek Sosial | | | |
| 1. | Pendidikan | 1 | Sarana dan prasarana setiap jenjang sekolah masih belum merata walaupun sarana dan prasarana tersebut sudah sesuai standar. |
| | | 2 | Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahlian. |
| | | 3 | Masih belum meratanya kualitas pendidikan pada setiap jenjang terutama SMK industri |
| | | 4 | Adanya kesenjangan antara output lulusan dengan tuntutan dunia kerja |
| | | 5 | Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (manajemen pengelolaan sekolah) |
| | | 6 | Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi/kebutuhan pasar tenaga kerja; |
| | | 7 | Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang; |
| | | 8 | Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; |
| | | 9 | Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya. |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 10 | Fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum cukup memadai dan merata; |
| | | 11 | Penyebaran SDM baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif masih belum merata. |
| 2. | Kesehatan | 1 | Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar yaitu hanya 47,55% dari jumlah penduduk Kota Pontianak. |
| | | 2 | Belum adanya puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2015. |
| | | 3 | Masih Kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak |
| | | 4 | Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional. |
| | | 5 | Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal |
| | | 6 | Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti dengan peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi; |
| | | 7 | Masih ditemukannya kasus kematian ibu sebanyak 7 kasus, kematian bayi sebanyak 27 kasus dan kasus gizi buruk sebanyak 27 kasus. |
| | | 8 | Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat. |
| 3. | Sosial | 1 | Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota; |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 | Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat; |
| | | 3 | Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan |
| 4. | Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pemuda | 1 | Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; |
| | | 2 | Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; |
| | | 3 | Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; |
| | | 4 | Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; |
| 5. | Kebudayaan | 1 | Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra; |
| | | 2 | Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya; |
| | | 3 | Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; |
| | | 4 | Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya; |
| | | 5 | Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa; |
| 6. | Ketahanan Pangan | 1 | Masyarakat masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok sumber karbohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pangan, disisi lain pengembangan keanekaragaman pangan lokal lainnya masih kurang; |
| | | 2 | Kota Pontianak sangat tergantung kepada pasokan pangan dari luar kota/luar daerah sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat rumah tangga; |
| | | 3 | Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; |
| | | 4 | Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum ideal. |
| 7. | Demografi | 1 | Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal; |
| | | 2 | Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia; |
| | | 3 | Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial; |
| | | 4 | Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota; |
| | | 5 | Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien. |
| Aspek Ekonomi | | | |
| 8. | Tenaga Kerja | 1 | Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja; |
| | | 2 | Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal; |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3 | Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; |
| | | 4 | Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada. |
| 9 | Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UMKM | 1 | Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah; |
| | | 2 | Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan; |
| | | 3 | Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); |
| | | 4 | Kemampuan teknologi IKM masih kurang; |
| | | 5 | Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran; |
| | | 6 | Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif; |
| | | 7 | Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat; |
| | | 8 | Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial. |
| | | 9 | Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung; |
| | | 10 | Jumlah koperasi aktif masih sedikit; |
| | | 11 | Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal; |
| | | 12 | Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang; |
| | | 13 | Akses pemodalannya bagi koperasi dan UMKM masih rendah. |
| | | 14 | Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Besarnya. |
| 10. | Perekonomian Kota dan Investasi | 1 | Pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata; |
| | | 2 | Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi; |
| | | 3 | Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. |
| | | 4 | Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; |
| | | 5 | Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi; |
| | | 6 | Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal; |
| | | 7 | Masih adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. |
| | | 8 | Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik. |
| 11. | Pariwisata | 1 | Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik sehingga lama tinggal wisatawan masih rendah; |
| | | 2 | Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal; |
| | | 3 | Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; |
| | | 4 | Belum optimalnya pengembangan wisata berbasis budaya dan air; |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 | Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; |
| | | 6 | Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkedala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata; |
| 12. | Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | 1 | Belum konkrit dan jelasnya arah kebijakan pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis di Pontianak Utara menghambat pengembangan pertanian; |
| | | 2 | Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas serta daya saing produk pertanian, masih belum berkembang; |
| | | 3 | Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang; |
| | | 4 | Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; |
| | | 5 | SDM, kelembagaan usaha perikanan dan sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai; |
| | | 6 | Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas perikanan belum optimal; |
| | | 7 | Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik. |
| | | 8 | Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH kota belum dapat diwujudkan dengan nyata; |
| Aspek Lingkungan | | | |
| 13. | Tata Ruang | 1 | Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota; |
| | | 2 | Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota. |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3 | Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal; |
| | | 4 | Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; |
| | | 5 | Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkan dengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa; |
| | | 6 | Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga banyak bangunan tanpa IMB; |
| | | 7 | Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya; |
| | | 8 | Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal dalam konsep penataan kawasan kota. |
| 14. | Keciptakarya | 1 | Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah. |
| | | 2 | Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; |
| | | 3 | Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman; |
| | | 4 | Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; |
| | | 5 | Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage; |
| 15. | Jalan dan Perhubungan | 1 | Pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana (Kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga); |
| | | 2 | Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas hanya dihubungkan oleh satu akses jembatan dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur; |
| | | 3 | Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata; |
| | | 4 | Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota; |
| | | 5 | Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan; |
| | | 6 | Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik : <ul style="list-style-type: none">- Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut : banyak oplet yang berubah menjadi pick up (angkutan barang; sampah);- Belum terkonsepnya Angkutan umum- Rute bus yang yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;- jalur angkutan barang dan orang;- Rute bus yang yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;- jalur angkutan barang dan orang;- Belum tersedianya Transportasi massal yang representatif.- Kondisi Halte yang kurang memadai.- Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;- Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas |
| 16. | Sumber Daya Air dan Air Bersih | 1 | Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | genangan belum optimal; |
| | | 2 | Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi; |
| | | 3 | Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran; |
| | | 4 | Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran; |
| | | 5 | Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi. |
| | | 6 | Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut; |
| | | 7 | Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga. |
| 17. | Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup | 1 | Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan; |
| | | 2 | Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal; |
| | | 3 | Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim, Pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup; sedimentasi; |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas Lingkungan Hidup. |
| | | 5 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri; |
| | | 6 Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal. |
| | | 7 Kurangnya penyediaan dan persebaran kawasan ruang terbuka hijau diseluruh kota; |
| | | 8 Pertumbuhan aktifitas perkotaan tak berimbang dengan kuantitas jalan; |
| | | 9 Peningkatan kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman baik kualitas maupun kuantitas. |
| | | 10 Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparah pada musim tertentu disebabkan oleh pembakaran lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya Maupun Kabupaten Pontianak yang berdampak pada Kota Pontianak; |
| | | 11 Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai; |
| | | 12 Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. |
| | | 13 Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami <i>urban sprawl</i> menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran; kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke Kabupaten. |
| | | 14 Perkembangan antar kecamatan yang berbeda; |



| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 15 | Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak Utara; |
| | | 16 | Curah hujan dan muka air yang tinggi; |
| | | 17 | Topografi Kota Pontianak yang relatif datar, sistem sanitasi yang ada sekarang adalah sistem pengelolaan yang dikembalikan ke alam untuk mereduksinya. |
| | | 18 | Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai; |
| | | 19 | Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan; |
| | | 20 | Bangunan di atas parit; |
| | | 21 | Angin Puting Beliung; |
| 18. | Energi | 1 | Rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensi layanan energy listrik di kota Pontianak merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industry perkotaan; |
| | | 2 | Upaya memanfaatkan angin dan sinar matahari yang berlimpah serta biogas sebagai sumber pembangkit energy listrik terbarukan belum dikembangkan dan belum didukung komitmen kebijakan; |
| Aspek Kelembagaan | | | |
| 19. | Komunikasi dan Informatika | 1 | Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government; |
| | | 2 | Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi; |
| | | 3 | Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi. |
| 20. | Pembinaan Pemuda dan Olahraga | 1 | Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal; |
| | | 2 | Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat; |
| | | 3 | Sistem manajemen keolahragaan yang belum professional dari masing-masing cabang olahraga; |
| | | 4 | Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb; |

| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 | Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal. |
| | | 6 | Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlit yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi. |
| 21. | Pelayanan Publik | 1 | Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan |
| | | 2 | Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan; |
| | | 3 | Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima. |
| | | 4 | Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal. |
| 22. | Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan | 1 | Pengembangan basis data yang akurat dan <i>up to date</i> sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik; |
| | | 2 | Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun; |
| | | 3 | Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien karena masih adanya kendala pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah; |
| | | 4 | Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; |

| No. | Tema Isu Pembangunan (Sektor) | Isu/ Permasalahan Terkait |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal; |
| | | 6 Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (<i>electronic Government (e-Gov)</i>) belum optimal; |
| | | 7 Belum optimalnya implementasi Good Governance. |
| | | 8 Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik. |
| | | 9 Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal. |
| | | 10 Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan; |

3.3 TAHAP PELINGKUPAN

Tahap pelingkupan merupakan tahapan tindak lanjut terhadap daftar panjang yang dihasilkan dari tahap pra-pelingkupan. Tahapan ini dilakukan guna melakukan verifikasi dan melakukan penapisan isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi isu-isu strategis. Proses pemusatan isu pembangunan (daftar panjang) menjadi daftar pendek dan isu strategis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan Verifikasi dan Klasifikasi

Verifikasi dan klarifikasi dilakukan untuk kembali mengidentifikasi daftar panjang hasil pra pelingkupan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati pada tahap pra pelingkupan.

b. Memilih Isu Strategis melalui Skoring dan Pengelompokan Tema

Skoring ini dilakukan untuk memilih isu-isu terkait yang akan dijadikan sebagai isu strategis. Indikator yang digunakan untuk memilih adalah



besaran nilai skoring yang disepakati oleh Pokja PL dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pontianak dan para pemangku kepentingan terkait.

Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan. Hasil pelingkupan digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJPD. Isu-isu strategis digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah.

Pokja PL melakukan pelingkupan dengan menggunakan hasil pra pelingkupan. Pokja PL melibatkan pemangku kepentingan dalam melakukan pelingkupan. Pokja PL menggunakan tabel hasil pra pelingkupan untuk menggali data/informasi penting lainnya terkait masing-masing isu pembangunan berkelanjutan yang ditelisik per tema.

Mengingat Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan kajian yang bersifat, strategis maka pokja melakukann identifikasi isu-isu yang bersifat strategis. Kriteria strategis yang digunakan, yaitu (1) menyangkut hajat hidup orang banyak, (2) lintas sektoral, (3) lintas wilayah, (4) berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, dan (5) potensi dampak kumulatif dan efek berganda. Masing-masing kriteria penilaian memiliki bobot dan penilaian, seperti dibawah ini :

a. Menyangkut hajat hidup orang banyak

1. Jika menyangkut penduduk di bawah 10% masyarakat Pontianak
2. Jika menyangkut penduduk kurang lebih 10%-30% masyarakat Pontianak
3. Jika menyangkut penduduk kurang lebih 30%-60% masyarakat Pontianak
4. Jika menyangkut penduduk di sebagian lebih (60%) masyarakat Pontianak
5. Jika menyangkut seluruh masyarakat Pontianak
6. Jika menyangkut seluruh masyarakat Pontianak dan berdampak pada masyarakat diluar Pontianak



b. Lintas sektoral

1. Jika hanya ditangani 2 SKPD
2. Jika ditangani oleh 3-5 SKPD
3. Jika ditangani oleh 6-10 SKPD
4. Jika ditangani oleh 11-20 SKPD
5. Jika ditangani oleh 21-30 SKPD
6. Jika ditangani lebih dari 30 SKPD

c. Lintas wilayah (bobot 15%)

1. Jika hanya melintasi 1 kecamatan
2. Jika hanya melintasi 2 kecamatan
3. Jika hanya melintasi 3 kecamatan
4. Jika hanya melintasi 4-5 kecamatan
5. Jika melintasi lebih dari 5 kecamatan
6. Jika menyangkut Seluruh dan Luar wilayah Kota Pontianak

d. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan

1. Berdampak dalam waktu 1-2 tahun
2. Berdampak hingga 3-5 tahun kedepan
3. Berdampak hingga 5-10 tahun kedepan
4. Berdampak hingga 10-20 tahun kedepan
5. Berdampak hingga 20 tahun kedepan
6. Berdampak hingga selamanya

e. Potensi dampak kumulatif dan efek berganda

1. Berdampak sebagian pada salah satu aspek pembangunan disalah satu kecamatan
2. Berdampak menyeluruh pada salah satu aspek pembangunan disalah satu kecamatan
3. Berdampak menyeluruh pada semua aspek pembangunan disalah satu kecamatan
4. Berdampak menyeluruh pada semua aspek pembangunan di Kota Pontianak
5. Berdampak menyeluruh pada semua aspek pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat

6. Berdampak menyeluruh pada semua aspek pembangunan secara nasional

Hasil dari analisa skoring adalah diperoleh **isu/permasalahan** dengan nilai skor ≥ 5 yang berarti sangat berpengaruh yang terangkum dalam **Daftar Pendek**. Isu/permasalahan yang mempunyai nilai akhir ≥ 5 yang berarti sangat berpengaruh hingga mendapat Daftar Pendek pada tabel lampiran 2. Setelah itu kemudian daftar pendek tersebut dikelompokkan menjadi 5 isu strategis, yang disepakati bersama yaitu :

1. **Kemiskinan dan Pengangguran**
2. **Alih Fungsi Lahan**
3. **Infrastruktur**
4. **Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan**
5. **Dinamika Demografi dan Sosial**

3.4 ANALISIS BASELINE DATA

Tahap Identifikasi dan Analisa Data atau yang biasa kita sebut dengan Analisis Baseline Data bertujuan untuk memberikan gambaran Pola kecenderungan isu-isu strategis KLHS; Faktor pendorong terjadinya isu-isu strategis; Perkiraan dampak pada skenario *Business as Usual*. Baseline Data berfungsi sebagai informasi awal untuk digunakan dalam proses pengkajian pengaruh. Data & Informasi yang harus dipersiapkan berupa : Data sosial; Data fisik alami; Data ekonomi; Data wilayah (spasial/ruang) yang bersumber dari:

- a. Data dan informasi instansional (daerah dan pusat) yang telah dimiliki Tim Penyusun KRP
- b. Dokumen perencanaan terkait
- c. Hasil-hasil studi/kajian tematik yang telah ada
- d. Narasumber kunci

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kecenderungan (baseline trend analysis), khususnya untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada data

time series. Untuk memudahkan analisis spasial maka dapat juga digunakan alat bantu (tools) SIG. Langkah-Langkah Untuk Analisis Kecenderungan:

- a. Mengumpulkan data time series untuk menganalisis kecenderungan isu-isu strategis tertentu pada lokasi tertentu baik data tabel maupun spasial.
- b. Melakukan analisis kecenderungan dengan berbagai macam pilihan metode dan teknik analisis.
- c. Melakukan pemeriksaan (verifikasi) data time series bersama pemangku kepentingan.
- d. Memperbaiki analisis kecenderungan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan.
- e. Menyajikan hasil analisis kecenderungan di dalam Laporan Pelingkupan.

Data dan informasi yang digunakan dalam KLHS RPJPD Kota Pontianak adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi data institusional. Kebutuhan data dalam penerapan KLHS RPJPD Kota Pontianak ini disesuaikan dengan isu strategis yang menjadi fokus kajian. Data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk:

- a. Narasi, yaitu penyajian data dalam bentuk narasi ke dalam sebuah paragraph, digunakan untuk menyajikan data kualitatif;
- b. Tabulasi, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel;
- c. Diagram, menyajikan data dalam bentuk diagram agar mudah untuk dipahami.



Analisis Kecenderungan Masa Lalu Hingga Saat Ini

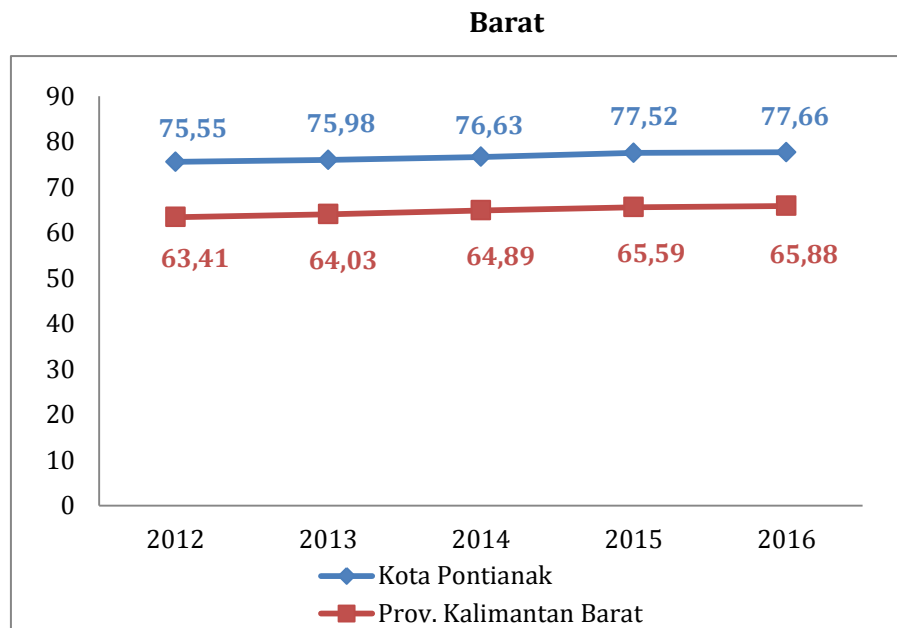
Isu Strategis 1 : Kemiskinan dan Pengangguran

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kota Pontianak ditunjukkan dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM di Kota Pontianak dalam periode 2013-2016 trennya menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 IPM Kota Pontianak sebesar 75,98 meningkat menjadi 77,66 pada tahun 2016. Kinerja perkembangan IPM Kota Pontianak sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Kalimantan Barat yang meningkat dari 64,03 pada tahun 2013 meningkat menjadi 65,88 pada tahun 2016. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.

Berdasarkan posisi relatifnya, capaian IPM Kota Pontianak pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/ Kota lain posisinya paling tinggi, yakni peringkat 1 dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Begitu pula apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kota Pontianak lebih tinggi dari IPM provinsi.

Gambar 3.1 IPM Kota Pontianak terhadap IPM Provinsi Kalimantan

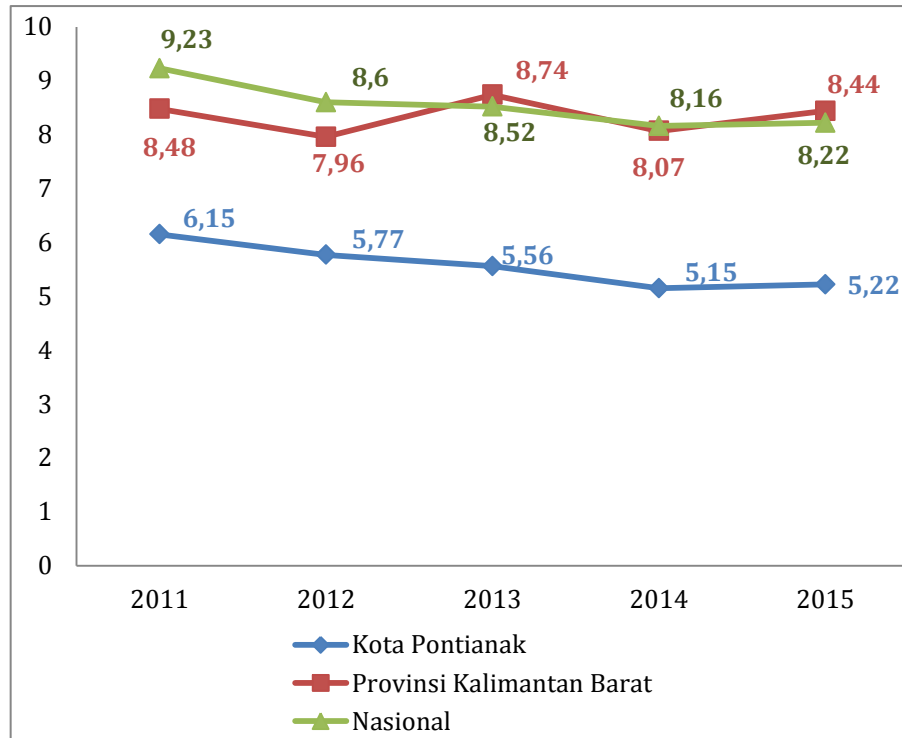


Sumber : BPS Kota Pontianak dan BPS Provinsi Kalimantan Barat

Kemiskinan menjadi isu yang penyelesaiannya memerlukan penanganan multi sektor. Tingkat kemiskinan di Kota Pontianak masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir (2011-2015) trennya berfluktuatif, namun trennya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 6,15%, berurutan mengalami penurunan menjadi 5,77% di tahun 2012, sebesar 5,56 di tahun 2013, sebesar 5,15% di tahun 2014, dan terjadi kenaikan di tahun 2015 yaitu sebesar 5,22%.

Tingkat kemiskinan Kota Pontianak tahun 2015 adalah 5,22%, masih rendah dibandingkan dengan ra-rata nasional 8,22% dan Provinsi Kalimantan Barat 8,44%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan Kota Pontianak lebih rendah dari kabupaten/kota lain.

Gambar 3.2 Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Nasional

Perkiraan Kecenderungan Masa Depan

| Faktor Pendorong Yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Kecenderungan Isu Di Masa Depan | Perkiraan Dampak Negatif Dan Positif Dari Faktor Pendorong Terhadap Kecenderungan Masa Depan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan yang rendah 2. Bonus Demografi 3. Lapangan Pekerjaan | <p>Pendidikan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding mereka yang</p> |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>berpendidikan rendah.</p> <p>Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja.</p> <p>Pada tahun 2020-2030, Kota Pontianak akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif akan melimpah. Apabila ditangani dengan baik, bonus demografi dapat menjadi mesin pertumbuhan bagi perekonomian Kota Pontianak, namun jika tidak akan menjadi beban apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM karena jika kualitas SDM buruk, jumlah pengangguran akan meningkat dan tingkat kemiskinan juga akan bertambah.</p> |
| Ringkasan | |
| <p>Masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Pontianak masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius sehingga sangat dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan karena akan meningkatkan SDM yang ada serta sangat dibutuhkan lapangan kerja yang cukup sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Pontianak.</p> | |

Analisis Kecenderungan Masa Lalu Hingga Saat Ini

Isu Strategis 2 : Alih Fungsi Lahan

Pembangunan sangat diperlukan untuk kelanjutan hidup manusia. Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya standar kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup. Dampak dari peningkatan standar kualitas dan kuantitas hidup tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut terjadi proses perubahan penggunaan lahan yang merubah tata guna lahan.

Tabel 3.2 Tutupan Lahan Kota Pontianak Tahun 2005

| No | Tutupan Lahan | Luas (Ha) | Prosentase (%) |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | Lahan terbangun | 3.206 | 29,72 |
| 2 | Lahan tak terbangun | 7.582 | 70,28 |
| Total | | 10.782 | 100 |

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak

Tutupan lahan tahun 2005 dari hasil klasifikasi citra 7/ETM+ didominasi oleh lahan tak terbangun dengan luas 7.582 Ha sekitar 70,28%, secara rinci dapat dilihat pada Prosentase. lahan terbangun pada tahun 2005 mencapai dari luas 3.206 Ha sekitar 29,72%.

Tabel 3.3 Persentasi Luas Pemanfaatan Tutupan Lahan Kota Pontianak Tahun 2015

| No | Tutupan Lahan | Luas (Ha) | Prosentase (%) |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | Lahan terbangun | 5.986 | 55,52 |
| 2 | Lahan tak terbangun | 4.796 | 44,48 |
| Total | | 10.782 | 100,00 |

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak



Tutupan lahan tahun 2015 dari hasil klasifikasi citra 7/ETM+ didominasi oleh lahan terbangun dengan luas 5.986 Ha dengan presentase 55,52, secara rinci dapat dilihat pada gambar. dan untuk lahan tak terbangun 4.796 Ha dan untuk presentase 44,48 %.

Dari analisis tutupan lahan diatas, perkembangan tutupan lahan dari tahun 2005 ke 2015 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, tutupan lahan terbangun bertambah dari 30% menjadi 56%, terjadi kenaikan sebanyak 26% yang artinya lahan tidak terbangun di Wilayah Kota Pontianak menjadi semakin kecil atau sempit yaitu hanya sekitar 44% pada tahun 2015.

Berdasarkan data yang di dapat, perubahan luasan guna lahan terjadi pada 3 (tiga) jenis guna lahan yang ada di Kota Pontianak, diantaranya perdagangan, hutan dan permukiman.

- a) Untuk guna lahan perdagangan pada tahun 2015 mengalami peningkatan luasan yang cukup besar dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 dan 2010 dengan luasan 698 hektar menjadi 998 hektar. Kondisi ini jika dilihat di lapangan, pada kenyataannya di Kota Pontianak banyak lahan-lahan yang tadinya merupakan permukiman dan hutan menjadi lahan terbangun dengan fungsi perdagangan (ruko).
- b) Untuk guna lahan hutan berbanding terbalik dengan guna lahan perdagangan, dari tahun 2005 dengan luasan 6.711 hektar mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 4.811 hektar, dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 4.670 hektar. Penurunan luasan guna lahan tersebut, diakibatkan oleh terjadinya perubahan guna lahan hutan menjadi lahan terbangun sebagai lahan permukiman dan perdagangan.
- c) Sedangkan untuk guna lahan permukiman, berdasarkan analisa yang dilakukan, luasannya mengalami fluktuasi (turun naik) dari tahun 2005 dengan luas 1.010 hektar menjadi 2.910 hektar pada tahun 2010 dan turun kembali di tahun 2015 menjadi 2.720 hektar. Namun penurunannya tidak begitu signifikan. Kondisi ini terjadi dikarenakan

kebutuhan akan permukiman yang semakin meningkat karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal oleh penduduknya.

Kondisi fisik wilayah Kota Pontianak yang datar dengan keberadaan cekungan dan tanah yang landai di beberapa bagian serta berada pada daerah muara sungai Kapuas menyebabkan kota ini sangat rentan terhadap potensi genangan air dan banjir khususnya pada wilayah-wilayah bantaran sungai. Apalagi diperparah dengan alih fungsi lahan yang semakin banyak permukiman tanpa memperdulikan kawasan hijau. Disisi lain perubahan iklim yang terjadi juga telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Pontianak antara lain banjir, dan kekeringan.

Genangan dan banjir juga mulai terjadi pada kawasan-kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air akibat pelanggaran ketentuan KDB dan kecenderungan masyarakat menutup tanah dengan semen/beton. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kapasitas dan daya tampung sungai dan saluran drainase akibat berbagai hal seperti penutupan/penyempitan parit, pembangunan di bantaran sungai/saluran, pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi serta perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di saluran dan sungai dapat menghambat aliran air. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0 - 2 %. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi genangan yang cukup luas antara lain:

- Parit Tokaya dan Sekitarnya : Kawasan Masjid Raya Mujahidin, Jalan KS. Tubun, Sutoyo,
- Suprpto dan Ahmad Yani

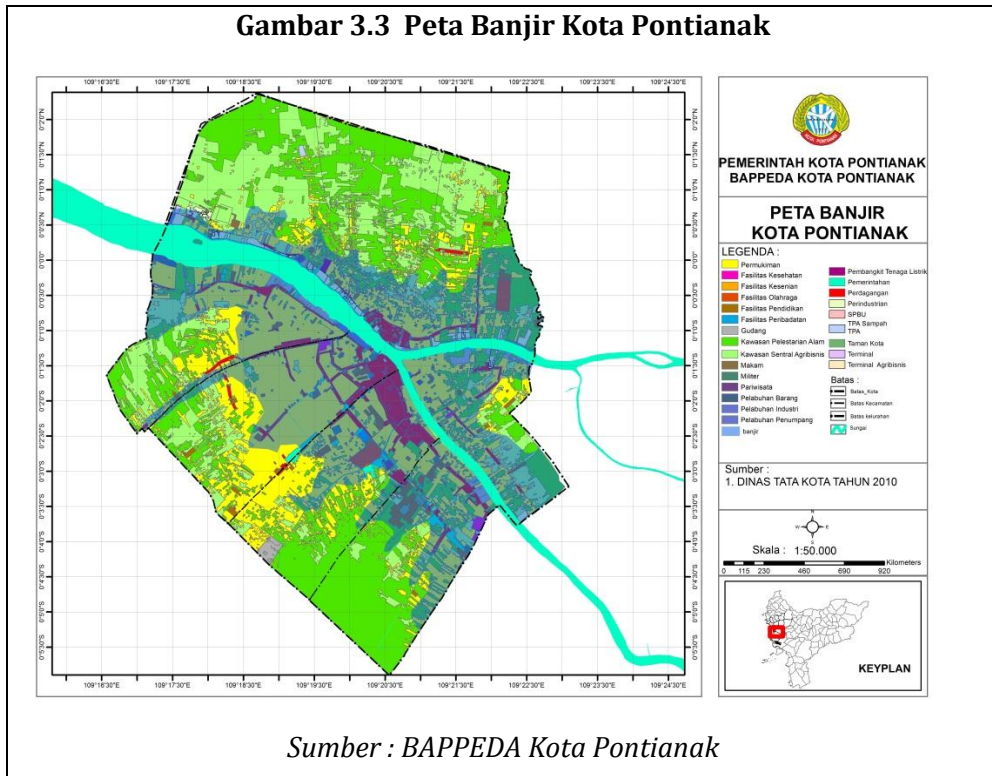


- Sungai Bangkong : jl. Alianyang dan Sekitarnya dan jalan Putri Daranante
- Wilayah Parit Bentasan Sekitar Sungai Malaya
- Wilayah sekitar Jeruju sampai Jl. Karet
- Wilayah Batu Layang
- Sebagian Besar wilayah Pontianak Timur yaitu Sekitar jalan Panglima Aim
- Wilayah sekitar Parit H. Husin I dan Sungai Raya Dalam

Wilayah genangan yang terdapat di Kota Pontianak sebagian besar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Selain itu luasnya wilayah genangan di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Banyaknya terjadi penyempitan saluran primer
- Keberadaan jembatan di beberapa saluran primer
- Bangunan di sepanjang bantaran sungai
- Terbatasnya ketersediaan daerah resapan
- Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke Sungai
- Kurangnya jalan paralel dengan parit dan Sungai
- Penyempitan jembatan di jalan Ahmad Yani, Tanjungpura dan Imam Bonjol
- Banyaknya bangunan di atas parit

Kondisi permukaan wilayah kota berada pada permukaan yang rendah, dan jika permukaan air pasang tertingginya minus 40 sentimeter.



Perkiraan Kecenderungan Masa Depan

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Faktor Pendorong Yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Kecenderungan Isu Di Masa Depan</p> | <p>Perkiraan Dampak Negatida dan Positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Inskonsistensi aturan tata ruang yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. 2. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. 3. Pertambahan penduduk. 4. Belum efektifnya perizinan sebagai mekanisme | <p>Apabila isu kunci ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keberlanjutan kota. 2. Penyimpangan dalam pemanfaatan tata ruang banyak terjadi di Kota Pontianak. 3. Memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pengendalian tata ruang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau 6. Fungsi RTH yang tidak berjalan optimal. 7. Banyaknya terjadi penyempitan saluran primer 8. Bangunan di sepanjang bantaran sungai 9. Prilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke Sungai 10. Banyaknya bangunan di atas parit. | <p>pembangunan dan perkembangan Kota Pontianak kedepannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlu adanya aturan yang tegas untuk menindak upaya pengalihan fungsi lahan yang semakin jauh menyimpang dari fungsi semula. 5. Menurunnya kualitas kota dari segi kenyamanan dan ekonomi karena kesalahan dan ketidakkonsistenan tata ruang. 6. Kota Pontianak akan terus mengalami kondisi genangan dan banjir. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ringkasan

1. Masih terjadinya inkonsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang.
2. Aspek-aspek pengendalian ruang seperti SDM, perangkat hukum/sanksi, insentif disintensif, perizinan dan *zoning regulation* belum sepenuhnya dijalankan sehingga memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.

Analisis Kecenderungan Masa Lalu Hingga Saat ini

Isu Strategis 3 : Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Permasalahan mutu pendidikan di Kota Pontianak tidak terlepas dari pemerataan kualitas pendidikan antara kecamatan, baik dari kualitas sarana, tenaga pendidik dan manajemen pendidikan. Oleh karena itu peningkatan mutu dan akses pendidikan perlu dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas mutu guru serta meningkatkan manajemen pendidikan.

Permasalahan kesehatan yang masih menjadi permasalahan adalah masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan atau pembangunan sarana kesehatan serta peningkatan sumber daya kesehatan lainnya.

Permasalahan yang ada pada pekerjaan umum adalah belum optimalnya mutu jalan, serta drainase. Peningkatan efektifitas urusan pekerjaan umum ini dilakukan dengan upaya pemeliharaan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik jalan dan saluran/ drainase.

Masih tingginya kondisi jalan rusak di Kota Pontianak. Kondisi ini ditunjukkan dengan data persentase jalan kondisi baik sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 50,7% dengan total panjang jalan 140,30 km. Untuk kondisi rusak berat pada tahun 2016 sebesar 52,67 km, nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu hanya 9,31 km.

Tabel 3.4 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (Km), 2012-2016

| Jenis Permukaan | Tahun | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Baik | 195,22 | 199,26 | 217,17 | 242,29 | 140,30 |
| Sedang | 4,41 | 4,21 | 3,14 | 40,00 | 52,90 |
| Rusak Ringan | 7,56 | 7,28 | 8,58 | 7,50 | 30,48 |
| Rusak Berat | 52,46 | 48,91 | 36,90 | 9,31 | 52,67 |
| Total | 259,64 | 259,64 | 265,79 | 299,10 | 276,34 |

Sumber : BPS, Kota Pontianak Dalam Angka 2017

Perkiraan Kecenderungan Masa Depan

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Pendorong Yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Kecenderungan Isu Di Masa Depan | Perkiraan Dampak Negatida dan Positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan |
| 1. Produk RTRW 2. Kondisi Jalan dan Drainase | |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan | |
| 4. Sarana dan Prasarana Kesehatan | |
| Ringkasan | |
| 1. Belum optimalnya kualitas pendidikan di Kota Pontianak sehingga perlu ditunjang dengan akses serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. | |
| 2. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. | |
| 3. Belum optimalnya mutu jalan, serta drainase. | |

| Analisis Kecenderungan Masa Lalu Hingga Saat ini |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu Strategis 4 : Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan |
| <p>Urusan lingkungan hidup juga menyangkut masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan sampah selama tahun 2009-2016 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2012 sebanyak 438.252m³/tahun dari jumlah sampah sebanyak 526.377 m³/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,26%, jika dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah volume sampah sebanyak 407.934 m³/tahun dengan jumlah sampah yang diangkut sebesar 73,85%. untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :</p> |

Tabel 3.5 Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2016

| No | Jenis | Tahun | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Jumlah produksi sampah (m ³ /tahun) | 552.367 | 567.834 | 502.146 | 526.377 | 586.243 | 589.424 | 612.047 | 623.981 |
| 2. | Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA (m ³ /tahun) | 407.934 | 410.606 | 397.897 | 438.252 | 438.750 | 472.836 | 523.410 | 533.628 |
| | Persentase (%) | 73,85 | 72,32 | 79,24 | 83,26 | 74,84 | 80,22 | 85,52 | 85,52 |

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Dalam pengelolaan persampahan di perlukan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS). Untuk melihat perkembangan sarana dan prasarana TPS selama tahun 2009-2016 dapat dilihat dari jumlah TPS dan Transferdepo pada tahun 2012 sebanyak 111 buah jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 147. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dari pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kebersihan Pertamanan yang berkomitmen untuk menutup TPS liar yang ada dan meminimalisir jumlah TPS.

Sarana TPA yang dimiliki Kota Pontianak saat ini seluas 26,6 Hektar dengan model pengolah berupa *open dumping* serta sebagian kecil dengan cara *control landfill*. Kedepan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model pengelolaan sampah di TPA diharuskan menggunakan metode *sanitary landfill*. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus secara intensif. Selain itu saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang merintis kerjasama pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan Kota Boras Swedia yang telah lama terkenal dengan efektifitas mereka dalam mengolah sampah menjadi sumber energi biogas dan listrik. Diharapkan dengan kerjasama ini kedepan akan membawa penanganan sampah kota Pontianak menjadi lebih baik.

Kondisi sanitasi yang ada saat ini di Kota Pontianak cukup memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Hal ini terjadi sebagai

akibat belum adanya saluran pengumpul dan pengolah air limbah tersebut sehingga air limbah yang dihasilkan rumah tangga langsung dibuang ke saluran. Akibatnya hampir sebagian besar parit/saluran drainase yang ada terpolusi oleh limbah-limbah rumah tangga seperti bahan kimia sisa sabun cuci, sabun mandi, bahkan tercemar oleh air limbah kotor.

Untuk itu isu strategis mengenai aspek sanitasi ini adalah bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber dana yang ada untuk secara bersama-sama melakukan perubahan perilaku, membuat regulasi yang mengatur secara jelas arah pembangunan sanitasi Kota Pontianak serta merealisasikan instalasi pengolahan air limbah baik skala pribadi maupun komunal. Meskipun banyak sekali kendala yang dihadapi untuk melakukannya akan tetapi perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat penuntasan permasalahan sanitasi ini, mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan akibat tidak terkelolanya sektor sanitasi ini dengan baik.

| Perkiraan Kecenderungan Masa Depan | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Pendorong Yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Kecenderungan Isu Di Masa Depan | Perkiraan Dampak Negatif Dan Positif Dari Faktor Pendorong Terhadap Kecenderungan Masa Depan |
| 1. Pencemaran air terjadi karena kurang memadainya pengelolaan, pengolahan pembuangan air limbah baik limbah cair maupun limbah padat. 2. Kesadaran masyarakat dan swasta (industri, perdagangan dan jasa) yang masih rendah. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. 4. Lemahnya penegakkan hukum. | Apabila isu kunci ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi : 1. Penurunan kualitas lingkungan akibat gunung sampah 2. Memburuknya kualitas air sungai jawi dan air sungai kapuas dari hulu ke hilir. 3. Menurunnya kualitas sumber air bersih dikarenakan sanitasi yang masih buruk. |



Ringkasan

1. Merubah sistem pengelolaan sampah yang sekarang dengan sistem pengelolaan *sanitary landfill*.
2. Harus ada tindakan legislatif yang mampu memberikan efek jera kepada masyarakat dan usaha komersil untuk mengelola limbah.
3. Mengendalikan pencemaran air permukaan dari sumbernya melalui penegakan peraturan daerah tentang air limbah.
4. Perlu sarana dan prasarana pengelolaan, pengolahan sampah dan pengolahan limbah yang memadai.
5. Pembangunan sarana air limbah berbasis masyarakat.
6. Melaksanakan program sungai dan kali bersih untuk mengembalikan daya pulih badan air penerima.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengurangan sampah dan pengelolaan limbah.
8. Pengelolaan sampah berawawasan lingkungan.

Analisis Kecenderungan Masa Lalu Hingga Saat ini

Isu Strategis 5 : Dinamika Demografi dan Sosial

Kota Pontianak terus mengalami penambahan penduduk dalam dekade terakhir. Pertambahan penduduk ini selain dari akibat alami yaitu kelahiran penduduk juga tidak terlepas dari fungsi strategis Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari penghidupan di kota ini (urbanisasi dan *commuter*). Dalam lima tahun terakhir tercatat pertumbuhan penduduk mencapai 1,8%.

Secara geografis, persebaran penduduk relatif kurang merata. Sebagai besar penduduk terkonsentrasi di wilayah selatan Sungai Kapuas yang mana secara fisik memang lebih cepat perkembangannya. Sedangkan secara administratif, wilayah kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah paling banyak penduduknya, namun apabila dibandingkan dengan luasan wilayahnya, Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah yang paling



padat penduduknya yang mencapai 10.549 jiwa/km².

Permasalahan yang adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan fisik kota dengan didukung jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu gender merupakan salah satu isu pokok lain yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka memperbesar peran serta perempuan secara aktif dalam pembangunan kota. Potensi perempuan sangatlah besar mengingat rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pontianak di tahun 2013 adalah 1,004 artinya jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Untuk itu perempuan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan.

Disisi lain peran anak dan pemuda juga tidak dapat dikesampingkan. Anak dan pemuda adalah gambaran masa depan sehingga perlu mendapatkan porsi yang sesuai dalam pembangunan seperti pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, mendesain program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang kreatifitas mereka sehingga terhindar dari aktifitas negatif dan tidak produktif.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota Pontianak merupakan tujuan bagi penduduk sekitar wilayahnya untuk beragam aktifitas. Penduduk yang datang dan tinggal di Kota Pontianak sangat beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Pontianak sebagai kota yang kaya dengan budaya multikultur dan tempat pertemuan budaya. Apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman ini dapat menimbulkan berbagai masalah

perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta ketidakdisiplinan masyarakat dan kemiskinan.

Berkaca kepada sejarah terjadinya konflik berlatar belakang etnis yang pernah terjadi, potensi berulangnya kejadian tersebut selalu ada. Untuk itu perlu selalu mewaspadaikan potensi tersebut dengan memperhatikan aspek pendekatan sosial dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Sehingga berbagai akibat yang mungkin timbul sebagaimana tersebut diatas dapat dihindari.

| Perkiraan Kecenderungan Masa Depan | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Pendorong Yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Kecenderungan Isu Di Masa Depan | Perkiraan Dampak Negatif Dan Positif Dari Faktor Pendorong Terhadap Kecenderungan Masa Depan |
| Daya tarik Kota Pontianak sebagai daerah <i>hinterland</i> . | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik kependudukan dengan daya dukung kota. 2. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat di kontrol. |
| Ringkasan | |
| Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut, merupakan tantangan dan Pekerjaan Rumah (PR) bagi semua pihak, khususnya bagi SKPD yang menangani kependudukan. | |

3.5 TAHAP PENGKAJIAN

Selanjutnya Pokja Pengendalian Lingkungan bersama dengan para pemangku kepentingan melakukan pengkajian berdasarkan dari proses pelingkupan dan hasil analisis baseline data. Pengkajian yang dilakukan terdiri dari (A) Pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan RPJPD yang meliputi Kajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan; (B)

Kajian pengaruh. Hasil proses ini diklarifikasikan kembali kepada pemangku kepentingan dalam kegiatan workshop hasil pengkajian dengan melakukan penapisan program-program utama prioritas yang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis KLHS. Kajian pengaruh mengundang para pakar untuk memberikan masukan terhadap hasil kerja Pokja Pengendalian Lingkungan.

3.5.1 Pengkajian Visi dan Misi

Tahapan ini mengkaji isu-isu strategis KLHS terhadap visi dan misi Kota Pontianak, kajian keterkaitan, kajian prinsip keseimbangan, dan kajian prinsip keadilan.

a. Kajian Prinsip Keterkaitan

Pada kajian prinsip keterkaitan ini akan dikaji mengenai keterkaitan visi misi RPJPD Kota Pontianak terhadap visi misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat. Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (content analysis) secara vertikal dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.

b. Kajian Prinsip Keseimbangan

Kajian prinsi keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup terhadap visi dan misi RPJPD Kota Pontianak.

c. Kajian Prinsip Keadilan

Kajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat & generasi. Menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.



Tabel 3.6 Kajian Prinsip Ketertarikan

| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| VISI : “PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN TERDEPAN DI KALIMANTAN TAHUN 2025” | VISI : “KALIMANTAN BARAT BERSATU DAN MAJU” | | x | | |
| MISI : 1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkana masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang | MISI : 1. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran. 2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. 3. Mewujudkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). 4. Mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bersatu. 5. Mewujudkan infrastruktur yang memadai. 6. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam | x | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) masyarakat yang paham politik, taat hukum tenteram dan tertib.</p> | <p>dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan.</p> <p>7. Mewujudkan perekonomian yang maju.</p> <p>8. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif.</p> <p>9. Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan berada.</p> | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 1 :</p> <p>1. Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan IPM mencapai 81,99, yang didukung dengan biaya pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, wajib belajar yang dicapai 12 tahun, semua anak kurang mampu dari SD s/d SMA digratiskan, sertifikasi guru tercapai 100</p> | <p>Sasaran Pokok Misi ke 1 :</p> <p>1. Terbangunnya etika dan moral budaya politik yang toleran di daerah dan menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>2. Meningkatnya kemandirian dan fungsi partai politik di daerah dalam menyerap,</p> | | | x | Terkait dengan misi RPJPD Provinsi ke- 8 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>persen, kelayakan guru mengajar dari SD s/d SMA mendekati angka 100 persen, bebas buta aksara, memiliki ketrampilan yang beragam dan berkualitas, mendapat dukungan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, yang dibarengi dengan watak dan perilaku yang berakhlak mulia, jujur, berbudaya dan beradab sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap berkepribadian Indonesia dan makin patriotik.</p> <p>2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau yang mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui dukungan upaya kesehatan,</p> | <p>menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi;</p> <p>3. Meningkatnya peran dan fungsi serta pelaksanaan komunikasi politik antara kekuatan institusi politik, masyarakat. DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga terbangun sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;</p> <p>4. Terbangunnya proses politik yang demokratis dan terbuka di daerah dengan mendorong kehidupan kepartaian di daerah yang harmonis, penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis guna mewujudkan stabilitas politik daerah;</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>pembiayaan kesehatan yang meningkat melalui APBD mencapai 15 persen, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, 100 persen keluarga kurang mampu digratiskan dari biaya kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70 tahun, sarana dan prasarana kesehatan memadai, pelayanan Puskesmas dapat berlangsung selama 24 jam, kebutuhan dokter spesialis tercukupi, sekaligus berkembang pola hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gerakan bersama yang dapat meminimalkan serangan penyakit demam berdarah, muntaber, diare dan siap mengantisipasi HIV/AIDS, NAPZA dan flu burung.</p> | <p>5. Semakin terbukanya iklim politik di daerah yang memungkinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam konteks penataan daerah otonom (pemekaran provinsi dan kabupaten/kota).</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| 3. Makin berkembangnya keteladanan para pemimpin, sekaligus mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, penumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan. penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global yang mendapat dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat. | | | | | |
| Sasaran Pokok Misi 2 : 1. Pemberdayaan terhadap perempuan, anak | Sasaran Pokok Misi 2 : 1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke | | | x | Terkait dengan misi RPJPD Provinsi ke - 8 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>dan masyarakat kurang beruntung mengalami kemajuan yang pesat dan mencakup berbagai bidang kehidupan melalui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.</p> <p>2. Kepedulian swasta dan masyarakat dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk terus meningkat melalui gerakan KB, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen dan akhirnya masalah kependudukan yang menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota sangat kecil, dibarengi dengan tertib administrasi kependudukan yang mantap.</p> <p>3. Kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah sosial,</p> | <p>seluruh wilayah dengan terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. Berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah termasuk pemanfaatan letak geografis Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Jawa, diarahkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar lokal baik secara regional maupun</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| terutama kemiskinan dan PMKS dapat menjadi gerakan bersama yang efektif dan dapat mengatasi masalah, sehingga penduduk miskin dan PMKS tidak lebih dari 5 persen. Penyalahgunaan NAPZA dan pertumbuhan HIV/AIDS di lingkungan generasi muda terkontrol dengan optimal melalui kegiatan olahraga dan apresiasi budaya. | internasional; 3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat; 4. Mantapnya pemanfaatan ruang yang serasi sesuai RTRWP yang telah ditetapkan terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air baku dan kawasan- kawasan lindung dengan meningkatkan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang, pengelolaan pertanahan, serta penguatan kelembagaan dan organisasi yang terlibat dalam penataan dan pengawasan tata ruang baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan; | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | 5. Terlaksananya pembangunan yang maju dan lebih merata di kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan pedalaman serta kawasan strategis lainnya. | | | | |
| Sasaran Pokok Misi ke 3 : 1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai <i>leading sector</i> , yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi. 2. Terwujudnya iklim investasi yang memiliki | Sasaran Pokok Misi ke 3 : 1. Tersedianya Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan rakyat; 2. Terbangunnya budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum; 3. Terlaksananya penegakan hukum dan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung | | x | | Terkait dengan misi RPJPD ke-7 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p><i>multiplier effect</i> terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan aktivitas ekonomi Kota Pontianak.</p> <p>3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.</p> <p>4. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan</p> | <p>tinggi hak asasi manusia;</p> <p>4. Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;</p> <p>5. Terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat;</p> <p>6. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;</p> <p>7. Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban;</p> <p>8. Terwujudnya situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik Pegawai</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.</p> <p>5. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</p> <p>6. Terwujudnya fasilitas perdagangan yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</p> <p>7. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap.</p> <p>8. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha.</p> | <p>Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan;</p> <p>9. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif;</p> <p>10. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>11. Terbangunnya kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efektif dan efisien, dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>9. Meningkatnya peranan jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga dalam perekonomian Kota Pontianak.</p> <p>10. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.</p> | <p>yang semakin konsisten dan transparan;</p> <p>12. Terbangunnya infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi dan informasi yang handal serta peningkatan kemampuan sumber daya aparturnya;</p> <p>13. Terwujudnya sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter;</p> <p>14. Tertatanya pola pengembangan karir, profesionalitas, dan kompetensi aparatur.</p> | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 4 :</p> <p>1. Terwujudnya drainase kota, daerah resapan dan ruang terbuka hijau yang mampu mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya banjir terutama di kawasan</p> | <p>Sasaran Pokok Misi ke 4 :</p> <p>1. Kondusifnya kehidupan sosial budaya masyarakat Kalimantan Barat yang harmonis dalam keberagaman dan kokoh dalam kebersamaan;</p> | | | x | Terkait dengan misi RPJPD Provinsi ke-5 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>perdagangan, jasa ruas jalan dan permukiman.</p> <p>2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas jalan yang cukup baik untuk menunjang perdagangan, jasa dan mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan kendaraan. Jalan memenuhi standart peraturan perundang-undangan baik terhadap fungsi, lebar, ada daerah pengawasan jalan maupun adanya jalur hijau, trotoar, dan sarana penandang cacat. Terwujudnya swasta ikut investasi membangun dan mengelola jalan serta partisipasi masyarakat dalam membangun jalan lokal.</p> <p>3. Terwujudnya penduduk Kota Pontianak termasuk keluarga miskin memiliki perumahan dan permukiman sehat dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, aman, bebas</p> | <p>2. Terciptanya keamanan daerah Kalimantan Barat yang kondusif bagi eksistensi martabat kemanusiaannya, keselamatan lahir batin warga negara, dan keutuhan wilayah;</p> <p>3. Terciptanya toleransi dan harmonisasi dalam kehidupan antar umat beragama di Kalimantan Barat.</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>genangan dan sarana persampahan .</p> <p>4. Terwujudnya kota dengan kualitas dan kuantitas air bersih yang memenuhi syarat dengan cakupan layanan mendekati 90% oleh PDAM dan adanya cadangan air bersih yang memenuhi syarat dari air hujan oleh masyarakat. Munculnya operator air bersih selain PDAM sebagai kompetitor dalam mengelola dan mendistribusikan.</p> <p>5. Terwujudnya kota dengan banyak alternative transportasi umum yang terinte-grasi baik moda transportasi darat, sungai dan udara yang aman, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien untuk menunjang kota perdagangan dan jasa.</p> <p>6. Terwujudnya kota dengan daya listrik yang cukup kuantitas dan kuantitas untuk</p> | | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>menunjang visi kota yaitu : sektor perdagangan, jasa , industri dan kebutuhan rumah tangga. Terwujudnya kota yang mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk penyediaan listrik dan sumber energy alternative lain sesuai kebutuhan perdagangan, jasa, industry dan rumah tangga.</p> <p>7. Terwujudnya kota dengan tata ruang dalam tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang memberi manfaat optimal bagi semua lapisan masyarakat, perdagangan dan jasa yang konsisten dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan.</p> <p>8. Terwujudnya pertumbuhan kawasan perkotaan dengan kesenjangan wilayah yang relative kecil serta berdasarkan daya dukung</p> | | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>dan keseimbangan lingkungan. Kesenjangan relatif kecil pada sarana, prasarana dasar, pendapatan dan kualitas lingkungan di semua wilayah kecamatan.</p> <p>9. Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku dan kondisi kualitas lingkungan udara, air dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan.</p> | | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 5 :</p> <p>1. Terwujudnya masyarakat yang faham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta beretika dalam berpolitik.</p> <p>2. Arah pembangunan bidang hukum adalah</p> | <p>Sasaran Pokok Misi ke 5 :</p> <p>1. Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan Sumberdaya Air yang terpadu dan menyeluruh antar sektor maupun antar wilayah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan, laut serta udara yang dapat</p> | | | x | Terkait dengan misi RPJPD Provinsi ke-3 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>mewujudkan optimalisasi sinergi antara aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi Kota;▪ Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat, Panitia Ran HAM Kota dan Prolegda dalam setiap penyusunan produk hukum daerah;▪ Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum. <p>3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta, dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak</p> | <p>menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Barat, serta ketersediaan angkutan publik baik di perkotaan maupun di perdesaan;</p> <p>3. Tersedianya pasokan listrik yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Barat, dan terlaksananya penyediaan energi listrik terlaksananya non BBM mulai dari pasokan/sumber pembangkit, transmisi dan distribusi yang lebih merata dengan tingkat keandalan yang baik. Meningkatnya penyediaan dan pembangunan air bersih untuk dapat dinikmati seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Barat;</p> <p>4. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| <p>dan kewajiban setiap warga di bidang keamanan dan ketertiban. Penggunaan pendekatan kemanan dan kesejahteraan yang tepat sarana dan seimbang.</p> <p>4. Terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>5. Terwujudnya organisasi pemerintah yang adaptif sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan efektif dalam menjalankan fungsi dan koordinasi.</p> <p>6. Terwujudnya optimalisasi anggaran berbasis kinerja dan karakteristik mendorong anggaran publik yang besar dan memperkecil anggaran aparatur.</p> | <p>panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;</p> <p>5. Terwujudnya sistem pengelolaan pesisir & pulau-pulau kecil secara terpadu;</p> <p>6. Terwujudnya sistem mitigasi bencana terhadap bahaya banjir, kekeringan serta abrasi pantai.</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | | | | | |
| | <p>Sasaran Pokok Misi ke 6 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sumber Daya alam yang berkelanjutan bagi pembangunan;2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan yang berbasis sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelestariannya;3. Terciptanya lingkungan hidup yang alami, serasi, rindang dan indah (ASRI) untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan;4. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan | | | | Terkait dengan misi RPJPD Kota ke-4 |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | <p>pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;</p> <p>5. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional;</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan;</p> <p>7. Tersedianya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | daya alam yang lestari dan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten dan terus menerus dalam rangka mempertahankan kelestarian dan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. | | | | |
| | Sasaran Pokok Misi ke 7: 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sepanjang tahun 2005 s/d 2025 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diproyeksikan berkisar antara 5% - 9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan pemerataan yang signifikan, sehingga tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita pada tahun 2025 setara dengan provinsi lain yang relatif sudah cukup maju. Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | <p>penduduk miskin ditargetkan di bawah 5%. Sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan kontribusi dan pertumbuhan yang relatif lebih besar dibandingkan sektor-primer. Perekonomian yang maju haruslah dapat menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan sebagai salah satu sasaran pokok dari SDG's;</p> <p>2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan kompetensi daerah dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dikelola secara efisien dan menjadi basis aktivitas ekonomi untuk memperkuat daya saing daerah. Pengembangan sektor- sektor ekonomi berbasis keunggulan lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijak</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | <p>akan terlaksana dan dikelola secara optimal dan berkesinambungan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis keunggulan lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijak akan terlaksana dan dikelola secara optimal dan berkesinambungan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>4. Berkembangnya industri pengolahan yang berbasis hasil pertanian, perkebunan, pertambangan. Kegiatan industri pengolahan dikembangkan sejalan dengan program pengembangan investasi daerah yang menunjang peningkatan kegiatan</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | perdagangan dan ekspor daerah. Pelaku usaha skala kecil dan menengah juga ditumbuhkembangkan, terutama kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil menengah, termasuk pula usaha mikro dan usaha kecil menengah (UMKM) yang dapat diandalkan sebagai penggerak perekonomian Kalimantan Barat di masa mendatang; | | | | |
| | Sasaran Pokok Misi ke 8: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan;2. Menurunnya angka kematian anak (menjadi 2/3 dari kondisi 1990) dan angka kematian ibu (menjadi 3/4 dari kondisi 1990);3. berkurangnya jumlah dan penyebaran HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit lainnya. | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | <p>Bersamaan dengan itu proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih dan air minum yang aman serta sanitasi dasar semakin meningkat;</p> <p>4. Tuntasnya pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun untuk kemudian ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun;</p> <p>5. menurunnya angka buta huruf hingga mendekati angka nol persen;</p> <p>6. Bertambahnya karya-karya inovatif disertai dengan HaKI dan meningkatnya hasil riset yang bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat;</p> <p>7. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pengusaha, wiraswasta yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatnya prestasi olahraga, dan</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Parameter-parameter tersebut merupakan sasaran pokok yang dirumuskan dalam SDG's. | | | | |
| | Sasaran Pokok Misi ke 9: <ol style="list-style-type: none">1. Terciptanya masyarakat Kalimantan Barat yang nasionalis religius, bercirikan setia pada negara dan bangsa, serta bertakwa kepada Tuhan YME dan berketiaan pada agama;2. Terbentuknya integritas masyarakat Kalimantan Barat yang dapat diandalkan, yaitu memiliki karakter kedaerahan yang tangguh, kompetitif, berkepribadian anggun dan santun berdasarkan falsafah Pancasila;3. Terbangunnya masyarakat Kalimantan Barat yang madani, yaitu memiliki karakter | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | RPJPD Provinsi Kalimantan Barat | Tingkat Konsisten/ Terkait | | | Catatan Perbaikan |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|
| | | Ya | Kurang | Tidak | |
| | berkemajuan, berkeadaban, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS); 4. Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat atas dasar prinsip saling menghargai dan toleransi. | | | | |



Tabel 3.7 Kajian Prinsip Keseimbangan

| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI : “PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN TERDEPAN DI KALIMANTAN TAHUN 2025” | x | x | x | Di dalam visi belum menyebutkan secara spesifik. Namun pada penjelasan visi sudah cukup menjabarkan bahwa ada prinsip keseimbangan |
| MISI : 1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkana masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. | x | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) masyarakat yang paham politik, taat hukum tenteram dan tertib. | | | | |
| Sasaran Pokok Misi ke 1 : 1. Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan IPM mencapai 81,99, yang didukung dengan biaya pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, wajib belajar yang dicapai 12 tahun, semua anak kurang mampu dari SD s/d SMA digratiskan, sertifikasi guru tercapai 100 persen, kelayakan guru mengajar dari SD s/d SMA mendekati angka 100 persen, bebas buta aksara, memiliki ketrampilan yang beragam dan berkualitas, mendapat dukungan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, yang dibarengi dengan watak dan perilaku yang berakhlak mulia, jujur, berbudaya dan beradab sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap berkepribadian Indonesia dan makin patriotik. | x | | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau yang mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui dukungan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan yang meningkat melalui APBD mencapai 15 persen, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalana kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, 100 persen keluarga kurang mampu digratiskan dari biaya kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70 tahun, sarana dan prasarana kesehatan memadai, pelayanan Puskesmas dapat berlangsung selama 24 jam, kebutuhan dokter spesialis tercukupi, sekaligus berkembang pola hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gerakan bersama yang dapat meminimalkan serangan penyakit demam berdarah, muntaber, diare dan siap mengantisipasi HIV/AIDS, NAPZA dan flu burung.</p> <p>3. Makin berkembangnya keteladanan para pemimpin, sekaligus mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai tujuan</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| bersama, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, penumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan. penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global yang mendapat dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat. | | | | |
| Sasaran Pokok Misi 2 : <ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan terhadap perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung mengalami kemajuan yang pesat dan mencakup berbagai bidang kehidupan melalui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.2. Kepedulian swasta dan masyarakat dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk terus meningkat melalui gerakan KB, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen dan akhirnya masalah kependudukan | | | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>yang menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota sangat kecil, dibarengi dengan tertib administrasi kependudukan yang mantap.</p> <p>3. Kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS dapat menjadi gerakan bersama yang efektif dan dapat mengatasi masalah, sehingga penduduk miskin dan PMKS tidak lebih dari 5 persen. Penyalahgunaan NAPZA dan pertumbuhan HIV/AIDS di lingkungan generasi muda terkontrol dengan optimal melalui kegiatan olahraga dan apresiasi budaya.</p> | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 3 :</p> <p>1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan memperkuat sektor</p> | x | | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>Perdagangan dan Jasa sebagai <i>leading sector</i>, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi.</p> <p>2. Terwujudnya iklim investasi yang memiliki <i>multiplier effect</i> terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan ber; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan aktivitas ekonomi Kota Pontianak.</p> <p>3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.</p> <p>4. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>struktural dan memperkuat perekonomian.</p> <p>5. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</p> <p>6. Terwujudnya fasilitas perdagangan yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</p> <p>7. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap.</p> <p>8. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha.</p> <p>9. Meningkatnya peranan jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga dalam perekonomian Kota Pontianak.</p> <p>10. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.</p> | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 4 :</p> <p>1. Terwujudnya drainase kota, daerah resapan dan ruang terbuka hijau yang mampu mengurangi genangan air dan</p> | | x | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>mencegah terjadinya banjir terutama di kawasan perdagangan, jasa ruas jalan dan permukiman.</p> <p>2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas jalan yang cukup baik untuk menunjang perdagangan, jasa dan mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan kendaraan. Jalan memenuhi standart peraturan perundang-undangan baik terhadap fungsi, lebar, ada daerah pengawasan jalan maupun adanya jalur hijau, trotoar, dan sarana penandang cacat. Terwujudnya swasta ikut investasi membangun dan mengelola jalan serta partisipasi masyarakat dalam membangun jalan lokal.</p> <p>3. Terwujudnya penduduk Kota Pontianak termasuk keluarga miskin memiliki perumahan dan permukiman sehat dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, aman, bebas genangan dan sarana persampahan .</p> <p>4. Terwujudnya kota dengan kualitas dan kuantitas air bersih yang memenuhi syarat dengan cakupan layanan mendekati 90% oleh PDAM dan adanya cadangan air bersih yang memenuhi syarat dari air hujan oleh masyarakat. Munculnya</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>operator air bersih selain PDAM sebagai kompetitor dalam mengelolah dan mendistribusikan.</p> <p>5. Terwujudnya kota dengan banyak alternative transportasi umum yang terintegrasi baik moda transportasi darat, sungai dan udara yang aman, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien untuk menunjang kota perdagangan dan jasa.</p> <p>6. Tewujudnya kota dengan daya listrik yang cukup kuantitas dan kuantitas untuk menunjang visi kota yaitu : sektor perdagangan, jasa , industri dan kebutuhan rumah tangga. Terwujudnya kota yang mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk penyediaan listrik dan sumber energy alternative lain sesuai kebutuhan perdagangan, jasa, industry dan rumah tangga.</p> <p>7. Terwujudnya kota dengan tata ruang dalam tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang memberi manfaat optimal bagi semua lapisan masyarakat, perdagangan dan jasa yang konsisten dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan.</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>8. Terwujudnya pertumbuhan kawasan perkotaan dengan kesenjangan wilayah yang relative kecil serta berdasarkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Kesenjangan relatif kecil pada sarana, prasarana dasar, pendapatan dan kualitas lingkungan di semua wilayah kecamatan.</p> <p>9. Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku dan kondisi kualitas lingkungan udara, air dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan.</p> | | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 5 :</p> <p>1. Terwujudnya masyarakat yang faham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta beretika dalam berpolitik.</p> <p>2. Arah pembangunan bidang hukum adalah mewujudkan optimalisasi sinergi antara aspek substansi, struktur dan</p> | | | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| <p>kultur hukum daerah, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">• Harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi Kota;• Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat, Panitia Ran HAM Kota dan Prolegda dalam setiap penyusunan produk hukum daerah;• Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum. <p>3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta, dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang keamanan dan ketertiban. Penggunaan pendekatan kemanan dan kesejahteraan yang tepat sarana dan seimbang.</p> <p>4. Terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> | | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Ekonomi | Lingkungan Hidup | Sosial | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| 5. Terwujudnya organisasi pemerintah yang adaptif sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan efektif dalam menjalankan fungsi dan koordinasi. 6. Terwujudnya optimalisasi anggaran berbasis kinerja dan karakteristik mendorong anggaran publik yang besar dan memperkecil anggaran aparatur. | | | | |



Tabel 3.8 Kajian Prinsip Keadilan

| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| VISI : "PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN TERDEPAN DI KALIMANTAN TAHUN 2025" | x | x | |
| MISI : 1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkana masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) masyarakat yang paham politik, taat hukum tenteram dan tertib. | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 1 :</p> <p>1. Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan IPM mencapai 81,99, yang didukung dengan biaya pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, wajib belajar yang dicapai 12 tahun, semua anak kurang mampu dari SD s/d SMA digratiskan, sertifikasi guru tercapai 100 persen, kelayakan guru mengajar dari SD s/d SMA mendekati angka 100 persen, bebas buta aksara, memiliki ketrampilan yang beragam dan berkualitas, mendapat dukungan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, yang dibarengi dengan watak dan perilaku yang berakhlak mulia, jujur, berbudaya dan beradaptasi sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap berkepribadian Indonesia dan makin patriotik.</p> <p>2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau yang mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mencapai derajat</p> | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>kesehatan yang optimal melalui dukungan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan yang meningkat melalui APBD mencapai 15 persen, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalana kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, 100 persen keluarga kurang mampu digratiskan dari biaya kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70 tahun, sarana dan prasarana kesehatan memadai, pelayanan Puskesmas dapat berlangsung selama 24 jam, kebutuhan dokter spesialis tercukupi, sekaligus berkembang pola hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gerakan bersama yang dapat meminimalkan serangan penyakit demam berdarah, muntaber, diare dan siap mengantisipasi HIV/AIDS, NAPZA dan flu burung.</p> <p>3. Makin berkembangnya keteladanan para pemimpin, sekaligus mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya,</p> | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| peningkatan daya saing, penumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan. penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global yang mendapat dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat. | | | |
| Sasaran Pokok Misi 2 : <ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan terhadap perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung mengalami kemajuan yang pesat dan mencakup berbagai bidang kehidupan melalui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.2. Kepedulian swasta dan masyarakat dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk terus meningkat melalui gerakan KB, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen dan akhirnya masalah kependudukan yang menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota sangat kecil, dibarengi dengan tertib administrasi kependudukan yang mantap. | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 3. Kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS dapat menjadi gerakan bersama yang efektif dan dapat mengatasi masalah, sehingga penduduk miskin dan PMKS tidak lebih dari 5 persen. Penyalahgunaan NAPZA dan pertumbuhan HIV/AIDS di lingkungan generasi muda terkontrol dengan optimal melalui kegiatan olahraga dan apresiasi budaya. | | | |
| Sasaran Pokok Misi ke 3 : 1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai <i>leading sector</i> , yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi. 2. Terwujudnya iklim investasi yang memiliki <i>multiplier effect</i> terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>ber; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan aktivitas ekonomi Kota Pontianak.</p> <p>3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.</p> <p>4. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.</p> <p>5. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</p> <p>6. Terwujudnya fasilitas perdagangan yang mendukung</p> | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</p> <p>7. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap.</p> <p>8. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha.</p> <p>9. Meningkatnya peranan jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga dalam perekonomian Kota Pontianak.</p> <p>10. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.</p> | | | |
| <p>Sasaran Pokok Misi ke 4 :</p> <p>1. Terwujudnya drainase kota, daerah resapan dan ruang terbuka hijau yang mampu mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya banjir terutama di kawasan perdagangan, jasa ruas jalan dan permukiman.</p> <p>2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas jalan yang cukup baik untuk menunjang perdagangan, jasa dan mampu menjaga</p> | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>keseimbangan pertumbuhan kendaraan. Jalan memenuhi standart peraturan perundang-undangan baik terhadap fungsi, lebar, ada daerah pengawasan jalan maupun adanya jalur hijau, trotoar, dan sarana penandang cacat. Terwujudnya swasta ikut investasi membangun dan mengelola jalan serta partisipasi masyarakat dalam membangun jalan lokal.</p> <p>3. Terwujudnya penduduk Kota Pontianak termasuk keluarga miskin memiliki perumahan dan permukiman sehat dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, aman, bebas genangan dan sarana persampahan .</p> <p>4. Terwujudnya kota dengan kualitas dan kuantitas air bersih yang memenuhi syarat dengan cakupan layanan mendekati 90% oleh PDAM dan adanya cadangan air bersih yang memenuhi syarat dari air hujan oleh masyarakat. Munculnya operator air bersih selain PDAM sebagai kompetitor dalam mengelolah dan mendistribusikan.</p> <p>5. Terwujudnya kota dengan banyak alternative transportasi umum yang terinte-grasi baik moda transportasi darat, sungai</p> | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>dan udara yang aman, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien untuk menunjang kota perdagangan dan jasa.</p> <p>6. Terwujudnya kota dengan daya listrik yang cukup kuantitas dan kuantitas untuk menunjang visi kota yaitu : sektor perdagangan, jasa , industri dan kebutuhan rumah tangga. Terwujudnya kota yang mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk penyediaan listrik dan sumber energy alternative lain sesuai kebutuhan perdagangan, jasa, industry dan rumah tangga.</p> <p>7. Terwujudnya kota dengan tata ruang dalam tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang memberi manfaat optimal bagi semua lapisan masyarakat, perdagangan dan jasa yang konsisten dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan.</p> <p>8. Terwujudnya pertumbuhan kawasan perkotaan dengan kesenjangan wilayah yang relative kecil serta berdasarkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Kesenjangan relatif kecil pada sarana, prasarana dasar, pendapatan dan</p> | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| kualitas lingkungan di semua wilayah kecamatan. 9. Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku dan kondisi kualitas lingkungan udara, air dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan . | | | |
| Sasaran Pokok Misi ke 5 : 1. Terwujudnya masyarakat yang faham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka mening-katkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta beretika dalam berpolitik. 2. Arah pembangunan bidang hukum adalah mewujudkan optimalisasi sinergi antara aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah, melalui : <ul style="list-style-type: none">• Harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi Kota;• Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat, Panitia | x | x | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <p>Ran HAM Kota dan Prolegda dalam setiap penyusunan produk hukum daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum. <p>3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta, dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang keamanan dan ketertiban. Penggunaan pendekatan kemanan dan kesejahteraan yang tepat sarana dan seimbang.</p> <p>4. Terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>5. Terwujudnya organisasi pemerintah yang adaptif sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan efektif dalam menjalankan fungsi dan koordinasi.</p> <p>6. Terwujudnya optimalisasi anggaran berbasis kinerja dan</p> | | | |



| RPJPD Kota Pontianak | Antar Kelompok Masyarakat | Antar General | Catatan Perbaikan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| karakteristik mendorong anggaran publik yang besar dan memperkecil anggaran aparatur. | | | |



3.5.2 Pengkajian Pengaruh Arah Pembangunan Daerah Terhadap Isu Strategis

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian atau talaahan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan dan/ kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Penelaahan pengaruh ini diawali dengan melakukan identifikasi dan memahami dampak positif dan negatif komponen



Tabel 3.9 Pengaruh Arah Pembangunan Terhadap Isu Strategis

| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| Misi ke 1 : "Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berakhlak mulia." | | | | | | |
| 1. | Seluruh lapisan masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, peningkatan penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanah UUD 1945 secara bertahap, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dari SD s/d SMA yang layak dan sesuai kebutuhan masyarakat, memberikan pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui kelancaraan proses sertifikasi, mengupayakan proses pembelajaran yang makin efektif dan peningkatan variasi materi lokal yang sesuai dengan visi dan misi Kota Pontianak melalui pelatihan-pelatihan, mengupayakan peningkatan keragaman ketrampilan lulusan SMK melalui berbagai kerjasama dan magang dengan dunia usaha yang lebih intensif dan partisipatif serta mengurangi buta aksara melalui program pendidikan luar sekolah yang terus menerus dengan mendorong partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat di bidang pelayanan pendidikan secara maksimal. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif karena adanya kesempatan yang sama akan pendidikan setiap lapisan masyarakat hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | + (pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak sangat positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | + (pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak sangat positif terhadap dinamika demografi dan sosial) |
| 2. | Meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, terjangkau dan tidak diskriminatif untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan anggaran kesehatan dari APBD sebesar 15 persen | +(pelaksanaan arah pembangunan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | + (pelaksanaan arah pembangunan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | secara bertahap, ada upaya maksimal untuk menggratiskan pelayanan kesehatan secara bertahap bagi keluarga miskin, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang makin memadai, meningkatkan dan mendorong partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, memperbanyak dokter spesialis sesuai kebutuhan, terus mengupayakan pelayanan puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam secara optimal, meminimalkan penyakin epidemis demam berdarah, muntaber, dan diare, menumbuhkan gerakan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi untuk bayi dan balita serta peningkatan kesiapan mengatasi HIV/ AIDS, NAPZA, dan Flu Burung. | akan berdampak positif karena adanya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran) | | akan berdampak sangat positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | | |
| 3. | Mengembangkan dan membudayakan keteladanan para pemimpin di semua lapisan masyarakat, peningkatan budaya patuh pada hukum di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan budaya patuh pada hukum di seluruh lapisan masyarakat melalui penyuluhan dan gerakan sadar hukum, peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa yang makin patriotik, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, menumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global, penggalian budaya daerah yang potensial sebagai kekayaan daerah, pembinaan dan peningkatan partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat terhadap insan pengembang dan pelestari budaya secara maksimal serta mengupayakan pengenalan budaya luhur sejak dini melalui pendidikan. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | + (pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak sangat positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan) | + (pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan budaya daerah) |

Misi ke 2 : "Terwujudnya masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjaminnya hak-hak warga."



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| 1. | Peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung yang mencakup berbagai bidang kehidupan, terus memperjuangkan hak-hak perempuan, berupaya meminimalkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, peningkatan perlindungan tenaga kerja perempuan, meningkatkan kemudahan akses perempuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya, peningkatan perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan membantu upaya pemasaran produk-produk yang mereka hasilkan melalui bantuan modal dan pemasaran. Disamping itu, pemerintah harus terus berupaya mendorong swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |
| 2. | Peningkatan kepedulian swasta dan masyarakat dalam penanggulangan masalah-masalah kependudukan seperti kriminalitas dan kekumuhan kota perhatian terhadap pemerataan penyebaran penduduk antar kecamatan, penguatan kembali Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen/ tahun, pengendalian migrasi ke Kota Pontianak dan peningkatan tertib administrasi kependudukan yang mantap. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap positif terhadap alih fungsi lahan, karena penambahan penduduk akan terintegrasi dengan lonjakan jumlah | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap positif terhadap meningkatnya kualitas lingkungan yang ada di Kota Pontianak) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap positif terhadap pemerataan penyebaran penduduk dan menekan angka pertumbuhan penduduk sehingga dapat |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | | | permukiman yang akan berdampak pada alih fungsi lahan) | | | terkendali pertumbuhan jumlah penduduk) |
| 3. | Peningkatan kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, tepat waktu dan sasaran dalam pelaksanaan program, penyediaan dana pendampingan untuk pembinaan penduduk miskin, menghilangkan pandangan bahwa penanggulangan masalah kemiskinan hanya menjadi tugas pemerintah dan peningkatan keakuratan data kemiskinan, sehingga angka kemiskinan tidak lebuhi 5 persen, diupayakan pengendalian PMKS terutama gelandangan, pengemis, anak jalanan, PSK, korban penyalahgunaan NAPZA dan banyaknya orang gila yang datang dari luar kota, peningkatan perhatian terhadap penyalahgunaan NAPZA dan HIV/ AIDS yang banyak diderita oleh generasi muda, peningkatan dukungan prasarana untuk anak dan usia lanjut terlantar serta pendataan PMKS yang belum akurat serta pembinaan generasi muda dengan fokus dampak negatif NAPZA dan HIV/ AIDS terhadap diri, keluarga dan masyarakat melalui olahraga dan budaya. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak terhadap positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |
| Misi ke 3 : "Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan" | | | | | | |
| 1. | Perekonomian dikembangkan kearah memperkuat pondasi ekonomi Kota Pontianak yang berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi ekonomi yang berunggulan kompetitif sebagai berikut: | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap | -(Arah pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap | -(Arah pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.2. Terwujudnya struktur ekonomi yang memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai <i>leading sector</i>, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi.3. Terwujudnya kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien, yang dilaksanakan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri.4. Terwujudnya iklim investasi yang dapat mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing ekonomi Kota Pontianak.5. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendiring perkembangan ekonomi dengan terseidanya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.6. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat internasional.7. Terwujudnya kondisi ketenagakerjaan yang <i>full employment</i> di Kota Pontianak.8. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu | peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran) | terkait dengan pengalihan fungsi lahan apabila Pontianak Town Square) | peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan) | masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | <p>memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Terwujudnya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri.10. Terwujudnya keharmonisan dan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan usaha besar.11. Terwujudnya kondisi usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan golongan ekonomi menengah ke bawah.12. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.13. Terwujudnya fasilitas perdagangan berupa trading house, mall, supermarket dan wujud pasar modern yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.14. Terwujudnya <i>Pontianak Town Square</i> (PTS) yang dapat mengakomodasi perkembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi serta berwawasan lingkungan.15. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efektif dan efisien) melalui pelayanan satu atap.16. Terwujudnya perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha.17. Terwujudnya pariwisata daerah untuk mengembangkan ekonomi dan citra kebudayaan nasional melalui penyerapan Teknologi Informasi (TI) secara terkendali, peningkatan peranan jasa rekreasi dan olahraga, pengembangan nilai-nilai | | | | | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | tradisional dan kesejahteraan guna meningkatkan jati diri serta nilai-nilai asli daerah dan bangsa Indonesia. 18. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat. | | | | | |
| Misi ke 4 : "Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan." | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase serta daerah resapan air yang mampu mengurangi genangan dan mencegah banjir di kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 2. | Peningkatan kualitas jalan dan peningkatan kuantitas (ruas) jalan baru yang mampu mengimbangi mobilitas penduduk, pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Meningkatnya standard lebar jalan sesuai fungsi, daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoar (pejalan kaki) dan akses penyandang cacat. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | -(Arah pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif terkait dengan pengalihan fungsi lahan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 3. | Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak hanya dengan anggaran pemerintah, tetapi juga operator swasta dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | | | | peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | | |
| 4.. | Mewujudkan masyarakat dan keluarga miskin memiliki perumahan permukiman sehat yang dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, sarana persampahan dalam lingkungan yang sehat. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak terjadi kenjangan yang dirasakan oleh masyarakat) |
| 5. | Meningkatkan kebutuhan masyarakat dan keluarga miskin terhadap akses air bersih yang cukup dari kualitas dan kuantitas terutama pada saat kemarau. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak terjadi kenjangan yang dirasakan oleh masyarakat) |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| 6.. | Meningkatkan layanan air bersih dari PDAM dan munculnya operator air bersih dari swasta agar tercapai efisiensi dan efektifitas cukup tinggi dan terjadi kompetisi yang sehat. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap pengurangan pengangguran dikarenakan ada lapangan kerja baru) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 7. | Mewujudkan kota tanpa perkumuh, ditandai dengan setiap keluarga punya sarana sanitasi sendiri atau bersama, tinggal dalam lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta aman. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap alih fungsi lahan, dengan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh terutama di bantaran sungai akan mengembalikan fungsi awal dari bantaran sungai itu sendiri) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak terjadi kenjangan yang dirasakan oleh masyarakat) |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| 8. | Meningkatkan pembangunan transportasi umum masal yang aman, nyaman, tanpa kemacetan dan efisiensi. Alternatif transportasi lebih banyak dalam upaya menunjang pertumbuhan wilayah dan ekonomi, seperti penyeberangan Batu Layang dan Nipah Kuning. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 9. | Mewujudkan prasarana transportasi antar moda yang terintegrasi antara transportasi darat ke transportasi udara dan transportasi air untuk antar pulau maupun ke pedalaman yang aman dan nyaman. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 10. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas listrik untuk keperluan perdagangan, jasa, industri, dan rumah tangga seiring pertumbuhan kota. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| 11. | Mewujudkan kota dengan sumber energi alternatif yang inovatif untuk menunjang perdagangan, jasa, industri, dan rumah tangga. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 12. | Peningkatan perencanaan tata ruang untuk menunjang kota perdagangan, jasa yang berwawasan daya dukung dan keseimbangan lingkungan serta berkesinambungan. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif aturan yang jelas terhadap penataan ruang yang berdampak pada fungsi lahan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 13. | Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang mampu menciptakan pertumbuhan wilayah relatif sama (kesenjangan relatif kecil) dan memperhatikan fungsi lahan 30% untuk ruang terbuka hijau yang tersebar. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif aturan yang jelas terhadap penataan ruang) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | | | yang berdampak pada fungsi lahan terutama RTH) | infrastruktur) | | |
| 14. | Peningkatan penataan ruang pada <i>hinterland</i> Kota Pontianak yang lebih serasi, sinergis antar wilayah kota dan kabupaten yang saling menciptakan keuntungan. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | -(Arah pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif terkait dengan pengalihan fungsi lahan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | -(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan terutama kualitas udara) | -(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak negatif terhadap dinamika demografi dan permasalahan sosial akan terjadi lonjakan commuter yang mengakibatkan kemacetan di kota pontianak) |
| 15. | Meningkatkan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan ruang kota dan lebih konsisten untuk masyarakat menengah dan kelompok bawah agar lebih berkeadilan. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak sehingga tidak terjadi kenjangan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | | | | | | yang dirasakan oleh masyarakat) |
| 16. | Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan tata ruang sesuai peraturan perundang-undang, daya dukung lingkungan dan semua pihak mempunyai komitmen untuk menggunakan cara preventif dalam pengendalian tata ruang. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif aturan yang jelas terhadap penataan ruang yang berdampak pada fungsi lahan) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 17. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku agar tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan sehingga memenuhi syarat untuk diolah menjadi air bersih. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| 18. | Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, swasta dan pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran untuk lebih sadar dan taat terhadap peraturan lingkungan serta munculnya kelompok sadar lingkungan dengan berbagai bentuk. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap hubungan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | | | | | lingkungan) | masyarakat dengan pemerintah maupun pihak yang berkepentingan) |
| 19. | Meningkatkan kualitas lingkungan air dan udara tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan dan tetap tidak menghambat berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan |
| Misi ke 5 : "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) masyarakat yang paham politik, taat hukum tentram dan tertib." | | | | | | |
| 1. | Masyarakat yang paham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, beretika dan berbudaya. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |
| 2. | Terwujudnya optimalisasi sinergi aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah; a. Melakukan harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemiskinan dan Pengangguran | Alih Fungsi Lahan | Pelayanan Dasar dan Infrastruktur | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | Dinamika Demografi dan Sosial |
| | berkesesuaian dengan visi kota; b. Mengoptimalkan peran/ partisipasi masyarakat, pendayagunaan kelembagaan Panitia HAM Kota dan Panitia Legislasi dalam setiap penyusunan produk hukum daerah; c. Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum. | | | | | akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |
| 3. | Terwujudnya kemandirian dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang kemandirian dan ketertiban yang menuntut tanggung jawab bersama. Penggunaan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tepat sasaran sebagai upaya menciptakan kemandirian dan ketertiban. | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |
| 4. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, organisasi yang efisien dan efektif melalui penataan struktur organisasi yang lebih rasional dan realistis guna mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Disamping itu terwujudnya derajat optimalisasi anggaran berbasis kinerja serta mensinergikan APBD yang diarahkan untuk memperbesar anggaran publik dan memperkecil anggaran aparatur. | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) | 0 (Netral) Tidak ada pengaruh secara signifikan | +(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak positif terhadap masalah sosial yang ada di Kota Pontianak) |

3.6 TAHAP PERUMUSAN MITIGASI/ ADAPTASI DAN/ ATAU ALTERNATIF

Tahap perumusan mitigasi dan alternatif dilakukan sejalan dengan tahap penilaian dampak. Setiap program yang dinilai memiliki dampak negatif terhadap isu strategis kemudian secara langsung diberikan mitigasi serta alternatif. Tahapan perumusan mitigasi yang dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam arah pembangunan. Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian, Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan kepada tim penyusun RPJPD. Tahap ini melakukan upaya mengembangkan mitigasi/ adaptasi dan/ atau alternatif meningkatkan kualitas RPJPD yang mencakup rumusan visi, misi, arah kebijakan. Mitigasi/ adaptasi berupa usulan-usulan tambahan kebijakan/ rencana/ program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan awal RPJPD. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan/ rencana/ program untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD. Hasil mitigasi dan alternatif dapat disampaikan pada tabel 3.10.

3.7 REKOMENDASI

Pokja PL merumuskan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil dari rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Pokja PL menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternative yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD.



Tabel 3.10 Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi Arah Pembangunan

| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| Arah Pembangunan Misi ke 3 | | | | | | |
| 1. | <p>Perekonomian dikembangkan kearah memperkuat pondasi ekonomi Kota Pontianak yang berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang berunggulan kompetitif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. 2. Terwujudnya struktur ekonomi yang memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai <i>leading sector</i>, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi. 3. Terwujudnya kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien, yang dilaksanakan | <p>Alih Fungsi Lahan</p> | <p>- (Pelaksanaan Program akan berdampak negatif terhadap alih fungsi lahan yang semakin meningkat)</p> | <p>Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh.</p> | <p>Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> | <p>Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh wilayah daerah atau difokuskan pada lokasi yang relatif tertinggal, dengan tetap memperhatikan aset dan nilai-nilai budaya lokal, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan jalur hijau maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> |
| | | <p>Menurunnya Kualitas Lingkungan</p> | <p>- (Pelaksanaan Program akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, kualitas tanah/air</p> | <p>Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan</p> | <p>-</p> | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | <p>dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri.</p> <p>4. Terwujudnya iklim investasi yang dapat mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing ekonomi Kota Pontianak.</p> <p>5. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendingkan perkembangan ekonomi dengan terseidanya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional.</p> <p>6. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat internasional.</p> <p>7. Terwujudnya kondisi ketenagakerjaan yang <i>full employment</i> di Kota Pontianak.</p> | | <p>dibawahnya serta pencemaran oleh limbah yang dihasilkan)</p> | <p>menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau lainnya.</p> | | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | <p>8. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.</p> <p>9. Terwujudnya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri.</p> <p>10. Terwujudnya keharmonisan dan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan usaha besar.</p> <p>11. Terwujudnya kondisi usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan golongan ekonomi menengah ke bawah.</p> <p>12. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang</p> | | | | | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | <p>berkeadilan.</p> <p>13. Terwujudnya fasilitas perdagangan berupa trading house, mall, supermarket dan wujud pasar modern yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</p> <p>14. Terwujudnya <i>Pontianak Town Square</i> (PTS) yang dapat mengakomodasi perkembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi serta berwawasan lingkungan.</p> <p>15. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efektif dan efisien) melalui pelayanan satu atap.</p> <p>16. Terwujudnya perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha.</p> <p>17. Terwujudnya pariwisata daerah untuk mengembangkan ekonomi dan citra kebudayaan nasional melalui penyerapan Teknologi Informasi (TI) secara terkendali, peningkatan peranan jasa rekreasi dan olahraga,</p> | | | | | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | <p>pengembangan nilai-nilai tradisional dan kesejahteraan guna meningkatkan jati diri serta nilai-nilai asli daerah dan bangsa Indonesia.</p> <p>18. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.</p> | | | | | |
| Arah Pembangunan Misi ke 4 | | | | | | |
| 2 | <p>Peningkatan kualitas jalan dan peningkatan kuantitas (ruas) jalan baru yang mampu mengimbangi mobilitas penduduk, pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Meningkatnya standard lebar jalan sesuai fungsi, daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoar (pejalan kaki) dan akses penyandang cacat.</p> | Alih Fungsi Lahan | - (Pelaksanaan Program akan berdampak negatif terhadap alih fungsi lahan yang semakin meningkat) | Memaksimalkan penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi kemacetan | Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana | <p>Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi publik dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik.</p> <p>Kerjasama antar pemerintah kota dan kabupaten dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik untuk transportasi antar kota/ kabupaten agar mengurangi kemacetan serta mengurangi pencemaran udara.</p> <p>Selain itu kesadaran dari masyarakat sendiri dalam bersosial agar tidak menimbulkan gesekan sosial.</p> |
| 3 | <p>Peningkatan penataan ruang pada <i>hinterland</i> Kota Pontianak yang lebih serasi, sinergis antar wilayah kota dan kabupaten yang saling menciptakan keuntungan.</p> | Alih Fungsi Lahan | - (Pelaksanaan Program akan berdampak negatif terhadap alih fungsi lahan yang semakin meningkat) | Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH | Menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana | <p>Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi publik dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik.</p> <p>Kerjasama antar pemerintah kota dan kabupaten dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik untuk transportasi antar kota/ kabupaten agar mengurangi kemacetan serta mengurangi pencemaran udara.</p> <p>Selain itu kesadaran dari masyarakat sendiri dalam bersosial agar tidak menimbulkan gesekan sosial.</p> |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | | | | (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. | | |
| | | Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan | - (Pelaksanaan Program akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, kualitas udara serta sampah dan pencemaran oleh limbah yang dihasilkan) | Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten lain dalam pengadaan moda transportasi publik antar daerah sehingga dapat mengurangi emisi gas dari kendaraan bermotor | - | |
| | | Dinamika Demografi dan Sosial | -(pelaksanaan arah pembangunan akan berdampak negatif terhadap dinamika | Adanya kerjasama antar pemerintah kota dan kabupaten dalam pengawasan terhadap lonjakan | Kesadaran masyarakat kota dan kabupaten untuk tidak melakukan | |



| No. | Arah Pembangunan | Isu Strategis | Kajian Pengaruh Arah Kebijakan/ Dampak | Mitigasi, dan/ atau Alternatif | | Rekomendasi |
|-----|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | | | demografi dan permasalahan sosial akan terjadi dan lonjakan commuter yang mengakibatkan kemacetan di kota pontianak dan dapat meningkatkan gesekan antar masyarakat kota dengan kabupaten serta dapat menimbulkan masalah sosial seperti tingkat kriminalitas) | commuter | sesuatu yang dapat mengakibatkan gesekan sosial. | |



BAB

4

PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS DALAM DRAFT RPJPD

Untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam rencana pembangunan, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (sustainability key questions). Pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan rencana pembangunan sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna "kepentingan" Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Ketidakjelasan yang seringkali terjadi ketika menilai apakah kepentingan Lingkungan Hidup telah atau belum diintegrasikan dalam penyusunan suatu rencana pembangunan umumnya terkait dengan ketidakjelasan apa makna "kepentingan" Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan Lingkungan Hidup tersebut "dipertimbangkan" atau diintegrasikan dalam penyusunan rencana

pembangunan. Oleh karena itu, dalam metodologi ini dijelaskan makna "kepentingan" Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*), (2) keberlanjutan (*sustainability*), dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (*environmental justice*). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (*implementasi*). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional.

Prinsip I : Pertimbangan keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*). Menunjukkan sejauh mana tingkat partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan; Kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan; Kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar lembaga (*formal* dan *non-formal*), dan antar wilayah; Kejelasan digunakannya pendekatan ekosistem dalam perencanaan pembangunan; Keterkaitan RPJPD Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, utamanya antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem.

Prinsip II : Pertimbangan kaidah-kaidah keberlanjutan (*sustainability*). Menunjukkan sejauh mana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta faktor kemampuan sumber daya alam pulih kembali (atau alih fungsi menjadi sumberdaya produktif lainnya) menjadi pertimbangan perencanaan pembangunan.

Prinsip III : Pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) (*environmental justice*). Mencegah terjadinya pembangunan yang berakibat pada marjinalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses, pemanfaatan, penguasaan, dan pengendalian terhadap sumberdaya alam. Pertimbangan keadilan juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur dasar dan informasi atas sumberdaya.



Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembangunan tersebut di atas, prinsip dan kriteria tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan termasuk indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolak ukur.

Kegiatan KLHS penyusunan RPJPD Kota Pontianak diakhiri dengan kegiatan *Penyampaian Hasil Rekomendasi KLHS RPJPD Kota Pontianak* yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dihadiri oleh pemangku kepentingan. Pada kegiatan ini, memaparkan hasil proses KLHS RPJPD Kota Pontianak yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, juga disepakati dan dapat diterima rekomendasi KLHS oleh tim penyusun RPJPD. Meskipun proses penyusunan telah selesai, Pokja Pengendalian Lingkungan masih memiliki kewajiban untuk “mengawal” proses pengintegrasian KLHS ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan dilakukannya KLHS Renstra SKPD. Berikut penjelasan hasil kesepakatan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam rancangan akhir RPJPD Kota Pontianak :

1. Visi dan Misi RPJPD Kota Pontianak 2005-2025

Berdasarkan kajian konsistensi Rumusan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok RPJPD terhadap Pembangunan Berkelanjutan yang meliuti prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal, yaitu :

a. Catatan perbaikan terhadap visi :

Visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Di Kalimantan Tahun 2025” belum secara langsung menyebutkan secara spesifik mengenai aspek ekonomi dan sosial walaupun pada penjelasan visi sudah menjelaskan secara jelas mengenai aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sedangkan kajian prinsip keterkaitan antara visi Kota Pontianak dan visi Provinsi Kalimantan Barat tingkat konsistensinya masih kurang.

b. Catatan perbaikan misi :

Misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi perlu dipertegas berdasarkan prinsip keseimbangan khususnya pada aspek

lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antar kelompok dan antargenerasi.

2. Arah Pembangunan

Misi ke 3 “Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan”

(1 arah pembangunan – 1 terindikasi dapat berpengaruh negatif)

Terwujudnya *Pontianak Town Square* (PTS) yang dapat mengakomodasi perkembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi serta berwawasan lingkungan dapat berpengaruh negatif terhadap alih fungsi lahan. Semakin banyaknya lahan terbangun akan mempengaruhi luasan kawasan hijau yang artinya dapat berdampak pada kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Misi ke 4: “Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan”

(19 arah pembangunan – 2 terindikasi dapat berpengaruh negatif)

2. Peningkatan kualitas jalan dan peningkatan kuantitas (ruas) jalan baru yang mampu mengimbangi mobilitas penduduk, pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Meningkatnya standard lebar jalan sesuai fungsi, daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoar (pejalan kaki) dan akses penyandang cacat. Peningkatan kuantitas jalan baru akan mengurangi lahan yang ada, semakin ditambah kuantitas jalan baik dari segi pelebaran atau penambahan panjang jalan akan berdampak pada alih fungsi lahan.
14. Peningkatan penataan ruang pada *hinterland* Kota Pontianak yang lebih serasi, sinergis antar wilayah kota dan kabupaten yang saling menciptakan keuntungan. Arah pembangunan ini dapat berdampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan, Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan, serta permasalahan sosial dan dinamika demografi. Kota Pontianak sebagai *hinterland* akan menimbulkan kebutuhan akan bangunan semakin meningkat hal ini akan menimbulkan dampak pada alih fungsi lahan, kemudian Kota Pontianak sebagai *hinterland* akan mempengaruhi semakin banyaknya *commuter* yang akan menimbulkan lonjakan jumlah penduduk pada pagi hari yang akan mengakibatkan



kemacetan apabilan tidak disinergikan dengan adanya transportasi publik yang memadai. Apabila semakin banyak jumlah kendaraan pribadi di Kota Pontianak akan menyebabkan kemacetan dan merusak kualitas udara akibat polusi yang ditimbulkan dari kendaraan.



BAB 5

HASIL PENGAWASAN MUTU

Untuk menjamin kualitas KLHS diperlukan adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah untuk menjamin mutu pelaksanaan KLHS sesuai dengan pedoman, sedangkan pengawasan eksternal mengikuti proses pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan RPJPD untuk menjamin pengintegrasian KLHS ke dalam RPJPD.

Dalam pelaksanaan KLHS RPJPD ini, pengawasan internal (pengawasan mutu) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak menggunakan instrument yang ada pada Permendagri No. 67 Tahun 2012. Berdasarkan hasil pengawasan mutu, secara umum proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bagi proses penyusunan KLHS berikutnya. Lengkapnya dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Hasil Pengawasan Mutu

| No | Kegiatan | Nilai* | | | | Ket** |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD | | | | | |
| | 1.1 Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah | | | x | | |
| | 1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi : a. Latar belakang b. Tujuan dan sasaran c. Lingkup kegiatan d. Hasil yang diharapkan e. Rencan kerja dan metode pengkajian f. Tenaga ahli yang diperlukan, dan g. Waktu dan pembiayaan | | | | x | |
| | 1.3 Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan. | | | X | | |
| | 1.4 Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi) | | | X | | |
| | 1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan. | | | X | | |
| 2 | KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD | | | | | |
| | 2.1 Melakukan Pelingkupan: a. Memverifikasi daftar panjang isu-Isu Pembangunan berkelanjutan. b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan; c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS; | | | X | | |



| No | Kegiatan | Nilai* | | | | Ket** |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf c. | | | | | |
| | 2.2 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a). posisi awal isu ikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b). prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan." | | X | | | |
| | 2.3 Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi); | | | | X | |
| | 2.4 Pengkajian Pengaruh Arah Pembangunan terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan: a. Mengkaji pengaruh arah pembangunan terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi 1. Identifikasi dan penentuan arah pembangunan yang akan dikaji; 2. Pengkajian pengaruh arah pembangunan terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan | | X | | | |



| No | Kegiatan | Nilai* | | | | Ket** |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | <p>3. Merangkum hasil kajian;</p> <p>b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG);</p> <p>c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;</p> | | | | | |
| | <p>2.5 Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah.</p> <p>a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan/atau alternatif;</p> <p>b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif</p> | | | X | | |
| | <p>2.6 Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJPD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:</p> <p>a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif;</p> | | | X | | |



| No | Kegiatan | Nilai* | | | | Ket** |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyetujui rekomendasi; c. Mengonsultasikan dan menyetujui substansi rekomendasi bersama SKPD; d. Menyusun draft laporan KLHS; e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJPD bersama Tim Penyusun RPJPD. | | | | | |
| 3 | Peran serta pemangku Kepentingan | | | | | |
| | 3.1 Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan) | | X | | | |
| | 3.2 Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi | | X | | | |

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam UU PPLH, adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environment Assessment* (SEA). KLHS pada prinsipnya merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana program jangka panjang daerah (RPJPD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Seluruh proses dalam penyusunan dokumen KLHS dilaksanakan secara partisipatif yang diawali dengan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh instansi daerah dan unsur-unsur seperti tim KLHS LSM, dan Tokoh Masyarakat.

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yang meliputi tahap pelibatan pemangku kepentingan, pelingkupan, pengumpulan dan analisis baseline data, pengkajian pengaruh program, perumusan mitigasi dan alternatif perbaikan program, penyusunan rekomendasi dan pengambilan keputusan. Tahap pelibatan pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen KLHS Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, LSM, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penerapan KLHS. Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RPJPD Kota Pontianak yang telah dilakukan agar memperhatikan **prinsip-prinsip** sebagai berikut :

1. Visi dan Misi agar memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
2. Arah kebijakan/ pembangunan agar memperhatikan kajian pengaruh yang berdampak negatif terhadap isu strategis yang muncul untuk Kota Pontianak.
3. Perlu komitmen dari pemerintah Kota untuk memperhatikan hasil KLHS RPJPD sebagai instrumen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan.
4. Dalam mengimplementasikan KLHS RPJPD sebagai instrumen perlu memperhatikan karakteristik wilayah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
5. Karakteristik wilayah yang harus mendapat perhatian adalah terkait dengan isu strategis berupa:
 - a. Kapasitas daya dukung & daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. Perkiraan dampak & resiko lingkungan hidup;
 - c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. Tingkat kerentanan & kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - f. Tingkat ketahanan & potensi keanekaragaman hayati.

6.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RPJPD Kota Pontianak, diperoleh rekomendasi dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap isu strategis yang ada pada Kota Pontianak. Rekomendasi untuk program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Visi : Di dalam visi maupun penjelasan belum menyebutkan secara spesifik mengenai aspek lingkungan hidup, pada penjelasan dari secara utuh dapat diartikan sebagai juga sebagai keutuhan kelestarian lingkungan alam atau menyeluruh diartikan sebagai keseluruhan baik aspek sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Misi : Misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi perlu dipertegas berdasarkan prinsip keseimbangan khususnya pada aspek lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antar kelompok dan antargenerasi.

Arah Pembangunan :

Misi ke 3 “*Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatam*”

(1 arah pembangunan – 1 terindikasi dapat berpengaruh negatif)

Terwujudnya *Pontianak Town Square* (PTS) yang dapat mengakomodasi perkembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi serta berwawasan lingkungan dapat berpengaruh negatif terhadap alih fungsi lahan. Semakin banyaknya lahan terbangun akan mempengaruhi luasan kawasan hijau yang artinya dapat berdampak pada kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Rekomendasi nya yaitu Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara merata dan proporsional di seluruh wilayah daerah atau difokuskan

pada lokasi yang relatif tertinggal, dengan tetap memperhatikan aset dan nilai-nilai budaya lokal, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan jalur hijau maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. Dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Misi ke 4: "Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan"

(19 arah pembangunan - 2 terindikasi dapat berpengaruh negatif)

2. Peningkatan kualitas jalan dan peningkatan kuantitas (ruas) jalan baru yang mampu mengimbangi mobilitas penduduk, pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Meningkatnya standard lebar jalan sesuai fungsi, daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoar (pejalan kaki) dan akses penyandang cacat. Peningkatan kuantitas jalan baru akan mengurangi lahan yang ada, semakin ditambah kuantitas jalan baik dari segi pelebaran atau penambahan panjang jalan akan berdampak pada alih fungsi lahan.
14. Peningkatan penataan ruang pada *hinterland* Kota Pontianak yang lebih serasi, sinergis antar wilayah kota dan kabupaten yang saling menciptakan keuntungan. Arah pembangunan ini dapat berdampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan, Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan, serta permasalahan sosial dan dinamika demografi. Kota Pontianak sebagai *hinterland* akan menimbulkan kebutuhan akan bangunan semakin meningkat hal ini akan menimbulkan dampak pada alih fungsi lahan, kemudian Kota Pontianak sebagai *hinterland* akan mempengaruhi semakin banyaknya *commuter* yang akan menimbulkan lonjakan jumlah penduduk pada pagi hari yang akan mengakibatkan

kemacetan apabila tidak disinergikan dengan adanya transportasi publik yang memadai. Apabila semakin banyak jumlah kendaraan pribadi di Kota Pontianak akan menyebabkan kemacetan dan merusak kualitas udara akibat polusi yang ditimbulkan dari kendaraan.

Rekomendasi : Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi publik dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik. Kerjasama antar pemerintah kota dan kabupaten dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik untuk transportasi antar kota/ kabupaten agar mengurangi kemacetan serta mengurangi pencemaran udara. Selain itu kesadaran dari masyarakat sendiri dalam bersosial agar tidak menimbulkan gesekan sosial.

6.3 REKOMENDASI BAGI PENYUSUN KEBIJAKAN PERENCANA PEMBANGUNAN

Agar hasil rekomendasi KLHS diintegrasikan pada substansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat batang tubuh dan/atau penjelasan rancangan peraturan daerah yang akan di tetapkan dan dilaksanakan dalam Penyusunan Rancangan RPJPD.

6.4 SARAN TINDAK

Saran tindak ini merupakan saran-saran yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil KLHS Kota Pontianak. Adapun saran tindak yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

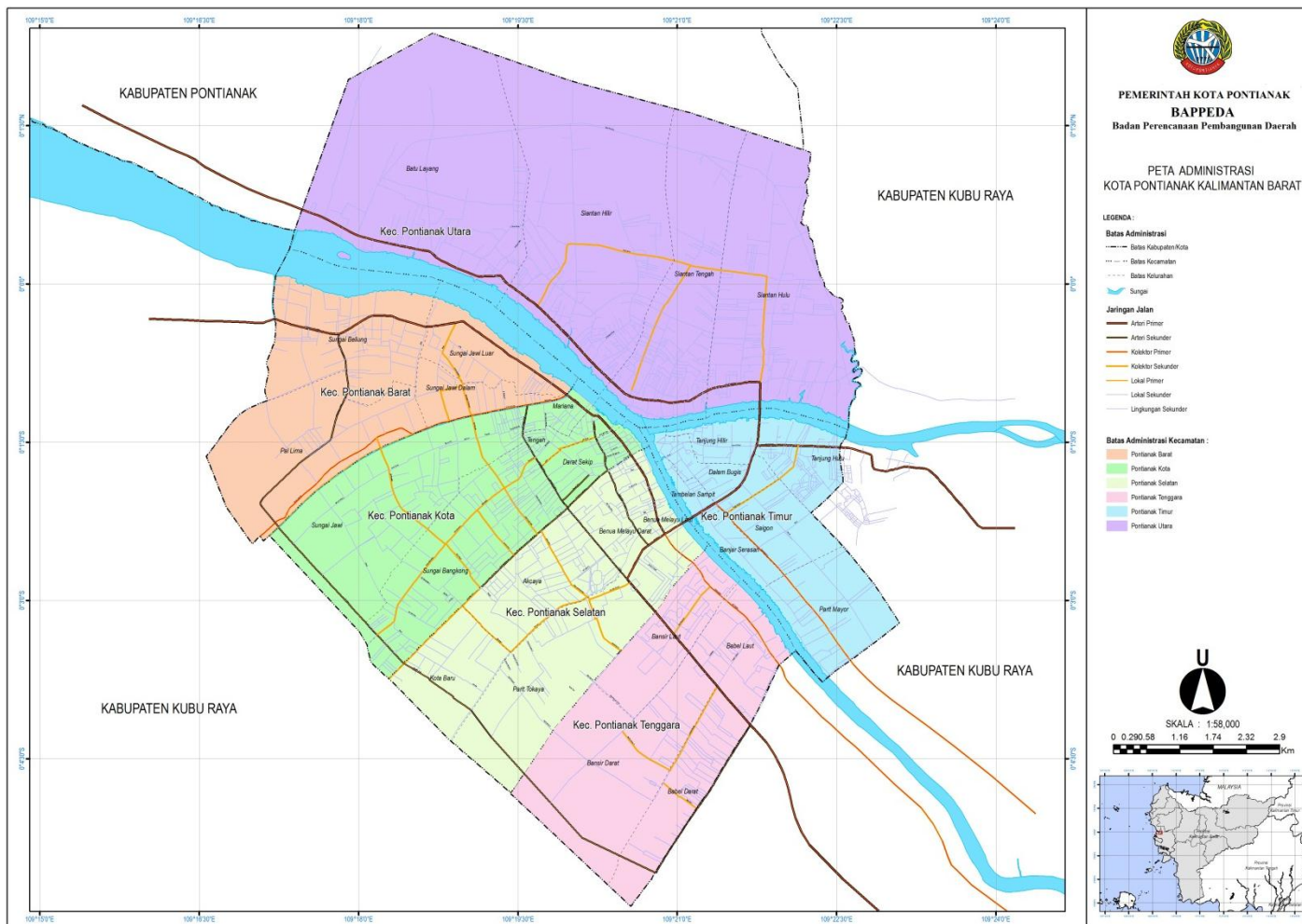
1. Pemerintah Kota Pontianak hendaknya konsisten terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh dengan cara memanfaatkan hasil pelaksanaan Penyusunan KLHS RPJPD Kota Pontianak sebagai masukan.
2. Dalam melakukan Proses Penyusunan KLHS, Pemerintah Kota Pontianak perlu mendorong partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan kapasitasnya.



3. Penyusunan KLHS Renstra bagi SKPD yang memiliki program dengan dampak negatif terkait Isu Strategis yang ada di Kota Pontianak.
4. Pemerintah Kota Pontianak perlu mengembangkan kapasitas secara terus menerus, baik di dalam lingkungan birokrasi maupun di luar lingkungan birokrasi, melalui pelatihan dan fasilitasi serta bantuan teknis terkait KLHS.
5. Pelaksanaan KLHS berikutnya perlu peningkatan tata laksana KLHS untuk mengatasi kendala-kendala dalam tahapan-tahapan KLHS seperti hubungan kerja antar komponen yang terlibat yang menjamin pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing, penyediaan *baseline* data dan analisa GIS, penyederhanaan proses KLHS tanpa mengurangi substansi agar KLHS tidak dianggap sebagai memberatkan dan menghambat perencanaan pembangunan.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pontianak





Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pontianak

